

MEMAKNAI PENGUASAAN DIRI SEBUAH ANALISA TEORI KOMPLEKSITAS IDENTITAS SOSIAL DALAM GAL 5:23

Kartono

Magister Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
wongklepubagus@gmail.com

Abstrak

Hidup bersama tidak pernah lepas dari penguasaan diri. Sikap ini dapat dimaknai melalui berbagai cara, salah satunya dalam terang Kitab Suci. Rasul Paulus dalam Gal 5:23 memberikan pemahaman baru terkait penguasaan diri dalam hidup manusia. Ia mengajarkan bahwa penguasaan diri tidak melulu berfokus pada kekuatan pribadi masing-masing orang tetapi penguasaan diri merupakan buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Dengan penguasaan diri yang seimbang, Rasul Paulus mampuewartakan Kristus bagi banyak orang, tak terkecuali bagi jemaat non Yahudi. Artikel ini menunjukkan penguasaan diri rasul Paulus dengan analisa Teori Kompleksitas Identitas Sosial-*Social Identity Complexity Theory* (SICT) yang belum pernah dilas dalam publikasi ilmiah sebelumnya. Penguasaan diri rasul Paulus tampak dalam pilihan sikapnya sebagai pewarta yakni *merger*. Ia berhasil menggabungkan dua identitas, baik Yahudi maupun non Yahudi dan menanamkan pemaknaan baru di antara jemaat seperti 'ciptaan baru, saudara-saudari dan kamu semua adalah satu' (Gal 3:28).

Kata Kunci : *Penguasaan diri, Teori Kompleksitas Identitas Sosial, Rasul Paulus, Surat Galatia*

Abstract

Living together is never separated from self-control. This attitude can be interpreted in various ways, one of which is in the light of the Holy Bible. The Apostle Paul in Gal 5:23 provides a new understanding of self-control in human life. He taught that self-control is not only focused on each person's personal strength but self-control is the fruit of the presence of the Holy Spirit within that person. With a balancing self-control, the Apostle Paul was able to proclaim Christ to many people, including for the Gentiles. This article shows the apostle Paul's self-control by analyzing the Social Identity Complexity Theory (SICT), which has never been reviewed in previous scientific publications. The apostle Paul's self-control is seen in his choice of attitude as a disciple, namely merger. He succeeded in combining the two identities, both Jewish and Gentile and instilling new meanings among the people such as 'a new creation, brothers and sisters and you are all one' (Gal 3:28).

Keywords: *Self-control, Social Identity Complexity Theory, Apostle Paul, Galatians Letters*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, penguasaan diri menjadi urgen untuk dibicarakan. Tanpa penguasaan diri yang baik kehidupan bersama akan ternodai dan memburuk. Apabila tidak memakai masker dan menjauhi kerumunan saja akan membahayakan orang lain terlebih dalam konteks pandemi. Ada banyak kecelakaan dan peristiwa yang terjadi karena nihilnya penguasaan diri. Dibalik semua ini, janaan-janaan orang sudah kehilangan arti dari penguasaan diri. Dengan demikian, mereka lupa bahwa penguasaan diri dibutuhkan untuk kehidupan bersama dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Menghadapi urgensitas ini maka diperlukan pemaknaan kembali akan penguasaan diri. Harapannya pemaknaan ini menjadi sebuah refleksi dan tolok ukur sejauh mana telah mengusahakannya. Dari latar belakang inilah, tulisan ini hadir. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sinkronis. Pendekatan yang digunakan ialah sosial ilmiah, teori kompleksitas Identitas Sosial (SICT).¹ Kok memberikan gambaran bahwa teori psikologi sosial ini relatif baru. Sebagai *tool*, SICT memberikan analisa teks yang unik, seperti menampilkan pola penciptaan identitas dalam narasi.

Penulis mengambil perikop Gal 5:23. Bagi penulis, surat-surat Paulus tidak hanya melulu berisi rumusan teologis tetapi juga mengandung sosial-komunal dan eklesial.² Lalu, bagaimana rasul Paulus memaknai penguasaan diri dalam Gal 5:23? Relevansi apa yang bisa diambil dari refleksi Rasul Paulus untuk hidup zaman ini? Adakah *insight* yang tidak hanya memperkaya pemahaman tentang penguasaan diri tetapi juga meneguhkan hidup bersama? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Bahan Dasar

Sebagai bahan dasar, penulis mengambil perikop Gal 5:23.

Gal 5:23 *πραύτης ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.*
Dari bahan tersebut, artikel ini akan fokus pada pemaknaan kata penguasaan diri- *ἐγκράτεια*. Dalam ilmu etika filosofis, penguasaan diri menjadi kata yang penting dalam hidup manusia. Sokrates

¹ Penemu/pencetus dikenalkan metode SICT ialah Marilynn B. Brewer dan Sonia Roccas. Keduanya memaparkan metode SICT. Sedangkan J. Kok adalah pelopor penggunaan metode SIT ini untuk Analisa Kitab Suci. Kemudian, karena dorongan dan penggunaan oleh Kok, beberapa ahli mengikuti juga memberikan catatan kritis seperti Elisabeth K. Hunt dan Bernard O Ukwuegbu.

² Hortensius F. Mandaru, *Menerawang Paulus: Catatan Tentang Etika Membaca dan Eko-Etika*, dalam *Tak Berbatas, tak Bermegah*, editor: YM Seto Marsunu, (Jakarta: LAI, 2011), hlm 37.

menyebut penguasaan diri sebagai salah satu keutamaan kardinal.³ Keutamaan ini merupakan keutamaan yang menjamin terselenggaranya hidup dengan baik.

Dalam Perjanjian Lama, penguasaan diri merujuk pada kata *restraint* (pengekangan/pembatasan diri). Kata ini terdapat dalam Sir 18:30 *Do not follow your base desires, but **restraint** your appetites* (RSV). Dalam terjemahan Bahasa Indonesia menjadi *jangan menuruti segenap keinginanmu, melainkan **jauhkanlah** dirimu dari segala nafsumu*. Penguasaan diri diartikan sebagai pengekangan diri yang kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi jauhkanlah dirimu. Perikop itu termasuk dalam satu kesatuan narasi Sir 18:30-19:17. Konteks dari perikop ini adalah ajakan bagi masyarakat waktu itu untuk mengendalikan nafsu seksual.⁴ Dengan demikian, seluruh masyarakat diperingatkan untuk tidak berlebihan dalam melakukan apapun karena apa yang serba berlebih itu dapat melanggar hukum dan keselarasan hidup.⁵

Kata penguasaan diri (self-control) itu sendiri dalam Perjanjian Lama hanya terdapat pada kitab Kebijaksanaan Salomo (Keb 8:7).⁶ *And if any one loves righteousness, her labors are virtues; for she teaches **self-control** and prudence, justice and courage; nothing in life is more profitable for men than these* (RSV). Terjemahan Bahasa Indonesia *dan kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan **menahan diri** dan berhati-hati, keadilan dan keberanian, dari pada semuanya itu tidak ada sesuatupun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia*. Perikop ini mengisahkan Salomo yang tengah jatuh hati pada nilai nilai keutamaan hidup. Penguasaan diri/*self-control* merupakan bagian dari empat keutamaan Kardinal atau keutamaan yang paling efektif dalam hidup selain *prudent, justice and courage*).⁷

Dalam periode intertestamen, penguasaan diri dijelaskan dalam 4 Mak 5:34.

*I won't prove disloyal to the Law that made me who I am today. I won't renounce the virtue of **self-control** that I value so dearly* (CEB-Common English Bible).

*I will not play false to you, o Law that trained me, nor will I renounce you, beloved **self-control*** (RSV-Revised Standard Version)

Kitab 4 Makabe ini tidak termasuk dalam Kitab Suci Katolik karena merupakan tulisan filosofis gabungan antara paham Yahudi dan Stoik (aliran Yunani) tentang keutamaan akal budi yang berada

³ Geoffrey w. Bromiley, *Theological Dictionary of the New Testament ed by Gerhard Kittel and G. Friedrich*, (California: William Eedmans Publishing Company, 1985), 174.

⁴ Leander E Keck dkk, *The New Interpreter's Bible Volume V* (USA: Abingdon Press, 1997),735.

⁵ Raymond E Brown dkk, *The New Jerome Biblical Commentary* (New Jersey: Prentice Hall, 1990),502.

⁶ George Arthur B, *The Interpreter's Dictionary of the Bible* (Nashville: Abingdon Press, 1981), 267.

⁷ Leander E Keck dkk, *The New Interpreter's Bible Volume V*, 509-510.

di atas perasaan-perasaan.⁸ Dari keterangan ini jelas bahwa penguasaan diri barangkali menjadi salah satu tema pengajaran untuk memuji keunggulan penalaran daripada perasaan.

Sementara dalam Injil, kata penguasaan diri tidak muncul sama sekali. Justru tema penguasaan diri banyak muncul dalam surat-surat Paulus. Dalam I Kor 9:25, rasul Paulus menganalogikan hidup beriman akan Kristus seperti mengikuti sebuah perlombaan, dan jemaat sebagai atletnya. Penguasaan diri ini terkait dengan mental para atlet untuk dapat menguasai dirinya terutama dalam perlombaan olimpiade agar memperoleh kemenangan. Dengan demikian jelas bahwa penguasaan diri yang dimaksud berkaitan dengan latihan disiplin, tidak mudah puas dengan hasil, dan terus berlatih tanpa harus tenggelam dalam perasaan atau emosi.

Dalam perikop 1 Korintus 7, terdapat kata *enkrateuontai*. Kata ini dikaitkan dengan askese dalam pelayanan. Penguasaan diri dikaitkan dengan mengontrol segala sesuatu yang duniawi, yang sifatnya menyenangkan, terutama soal nafsu akan benda-benda duniawi. Penguasaan diri ini mengarahkan diri kepada orang lain, membangun tubuh Kristus dan hidup saling bekerja sama satu sama lain (Ef 5:21). Misalnya “*Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih,...kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri*” (Gal 5:13,14).

Dalam 2 Tim 3:3 terdapat kata *akrates*. Kata ini merupakan lawan *enkrateia*. *Akrates* bisa diartikan *lost control*, *lack of control* atau *out of control* (bdk. 1 Kor 7:5, 1 Tes 5:4-7, 2 Tim 3:2-4).⁹ “*Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat..sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat*” (Rm 7:15, 19). Singkatnya, *akrates* ialah kondisi tak terkontrol yang mana orang justru dikendalikan oleh emosi bukan mengendalikan emosinya. Orang tersebut menjadi budak dari emosinya. Marah, takut, depresi ini merupakan contoh dari ketidakmampuan untuk menguasai diri. Jeleknya, bila seseorang tidak mampu menguasai diri yang terjadi ialah pengabaian akan yang lain.

Sekilas SICT

Teori kompleksitas identitas sosial memberi bantuan bagi penulis untuk mempelajari pembentukan identitas dan perannya dalam konflik dari perspektif individu dan kolektif.¹⁰ Bernard

⁸ <https://katolisitas.org/tentang-kitab-3-dan-4-makabe/> diakses pada hari Sabtu, 22 Januari 2022 Pkl 09.10 WIB.

⁹ Geoffrey w. Bromiley, *Theological Dictionary of the New Testament ed by Gerhard Kittel and G. Friedrich*, 174.

¹⁰ Elizabeth K. Hunt, “Intergroup Conflict and Social Identity in Galatians: An Exegetical Analysis”, *Journal of Biblical Perspectives in Leadership* 8, No. 1 (2018), hlm 236.

O Ukwuegbu menambahkan bahwa teori ini menyangkut relasi antar individu dan kelompok.¹¹ Masing-masing individu dalam masyarakat yang kompleks itu memiliki keanggotaan kolektif lintas kategori.¹² Kok juga mendorong penggunaan teori kompleksitas identitas sosial ini dalam hubungannya dengan studi eksegesis untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah identitas sosial pada Gereja awal mula dengan berfokus pada analisa budaya sejarah primer (dunia di balik teks).

Ada 4 model perwakilan identitas yang diusulkan oleh Kok merujuk pada pemikiran Roccas dan Brewer untuk menganalisa identitas sosial dalam Kitab Suci: Pertama, Perpotongan/*intersection*. Perpotongan memungkinkan adanya gabungan identitas sederhana di perpotongan dua kelompok. Misalnya, identitas gender dan profesi saling berpotongan menghasilkan identitas yang majemuk dan sederhana.¹³ Model ini menyiasati agar seorang individu dapat memperoleh pengakuan secara bersamaan lebih dari satu identitas sosial. Artinya satu sisi orang itu tetap mempertahankan identitasnya dan di sisi lain menemukan identitas yang lainnya dari beberapa keanggotaan kelompok.¹⁴ Kedua, Dominasi/*Dominance*. Strategi lain individu untuk menghadapi identitas yang berbeda (bersaing) adalah menjadikan salah satu identitas itu dominan dan membangun yang lain itu sebagai hubungan bawahan. Mereka yang termasuk dalam kategori sosial dipandang sebagai orang dalam sementara mereka yang bukan bagian dari kelompok sebagai orang luar.

Ketiga, Kompartementalisasi/*compartmentalization*. Seorang individu bisa memiliki banyak kelompok sosial yang membentuk dan menentukan identitas sosial. Dalam kasus seperti itu, kompartementalisasi adalah salah satu strategi seseorang untuk mengelolanya. Dengan kompartementalisasi, seseorang akan mengaktifkan banyak identitas dan mengekspresikan identitas tersebut secara kontekstual dan eksklusif. Akibatnya seseorang dapat terombang-ambing di antara kedua identitas sosial yang berbeda sesuai dengan tuntutan konteks. Keempat, Penggabungan/*Merger*. Model keanggotaan kelompok ini ialah menyebar secara bersamaan. Akibatnya menjadi model paling inklusif sekaligus kompleks.

Sekilas Surat Galatia

Surat kepada jemaat di Galatia memuat pertanggungjawaban Rasul Paulus atas kerasulannya.

Kerasulan itu bukanlah pilihannya sendiri tetapi pilihan dan penugasan dari Allah. Karena berisi

¹¹ Bernard O Ukwuegbu, "Paraenesis, Identity-defining Norms, or Both?", hlm 541.

¹² Marilyn B. Brewer, "Social Identity Complexity and Acceptance of Diversity", *Journal the Psychology of Social and Cultural Diversity*, diedit oleh Richard J. Crisp, (2010), hlm 12.

¹³ Elizabeth K. Hunt, "Intergroup Conflict and Social Identity In Galatians: An Exegetical Analysis", hlm 238.

¹⁴ Sonia Roccas & Marilyn B. Brewer, "The Open University of Israel, Social Identity Complexity", *Personality and Social Psychology Review* Vol. 6, No. 2 (2002), hlm 90.

pertanggungjawaban atas kerasulan, tidak jarang surat ini bernada panas dengan ungkapan-ungkapan keras seperti ‘terkutuklah, munafik, orang-orang bodoh’ bahkan ditulis dengan huruf besar (Gal 6:11).¹⁵

Selain itu, surat ini ditulis dalam tekanan orang-orang Yahudi Kristen konservatif kepada orang-orang Kristen dari latar belakang non-Yahudi untuk mentaati hukum Taurat apabila mereka ingin diselamatkan. Maka jelas bahwa surat ini ditujukan oleh Paulus bukan untuk satu jemaat saja tetapi beberapa jemaat yang ada di kawasan dengan nama Galatia di Asia Kecil bagian tengah. Wilayah Galatia merupakan dataran tinggi di bagian tengah Anatolia yang sekarang masuk wilayah Turki, sedangkan kota-kota yang dikunjungi Paulus di wilayah itu antara lain Anthiokia Pisidia, Listra, Ikonium, dan Derbe.¹⁶

Ada empat bahasan pokok dalam surat Galatia.¹⁷ *Pertama*, Paulus membela Injil yang diwartakannya berasal dari pewahyuan Allah. Pembelaan ini untuk melawan pihak-pihak yang mengajarkan bahwa keselamatan akan diterima bila orang mentaati hukum Taurat. *Kedua*, Paulus memaparkan pembenaran oleh iman. Lawan Paulus itu berpegang pada keyakinan bahwa keselamatan diperoleh dari memenuhi tuntutan Taurat, tetapi bagi Paulus keselamatan diterima kalau orang beriman kepada Kristus. *Ketiga*, Paulus berbicara tentang peran dari hukum Taurat, yakni menjadi wali atau pengawas yang membimbing orang sampai pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah (Gal 4:2), yaitu ketika percaya pada Yesus. Saat yang ditentukan oleh Allah itu ialah saat kedatangan Yesus. Orang tidak lagi berada di bawah perwalian Taurat tetapi dalam bimbingan Yesus. Tugas Taurat sebagai *paedagogos* sudah selesai.

Keempat, Paulus menasihati jemaat untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa (5,13). Maka jemaat harus hidup dalam roh, saling melayani, dan saling membantu. Persis pada pokok bahasan keempat itulah tema pembicaraan artikel ini berada. Maka, tema penguasaan diri dalam Galatia ini ada dalam arahan atau nasihat Paulus.¹⁸ Ia memberi nasehat kepada jemaat Galatia untuk mampu menguasai diri.

SICT dalam Galatia

Menurut Kok, orang Mediterania kuno merupakan individu yang sangat berorientasi pada kelompok. Kendati kuat dalam kelompok tetapi mereka tidak sembarangan dalam berafiliasi dalam kelompok. Yudaisme itu mempunyai rasa percaya diri di tengah diaspora sehingga menolak

¹⁵ St. Eko Riyadi, *Surat-surat Proto-Paulino. Buku Ajar* (Yogyakarta: FT USD, 2017), hlm 38.

¹⁶ Craigh A. Evans & Stanley E. Porter, *Dictionary of New Testament background*, (Leicester: Intervarsity Press, 2000), hlm 389.

¹⁷ St. Eko Riyadi, *Surat-surat Proto-Paulino. Buku Ajar*, hlm 42.

¹⁸ Bernard O Ukwuegbu, “Paraenesis, Identity-defining Norms, or Both? Galatians 5:13-6:10 in the Light of Social Identity Theory”, *The Catholic Biblical Quarterly*, Vol.70 No.3, (July 2008), hlm 538.

berasimilasi dengan kaum pagan dan mengembangkan bentuk identitas Yahudi yang independen serta berbeda dari lingkungannya.

Dari sekian identitas kelompok Yahudi, agama merupakan identitas yang paling dominan. Dalam surat Galatia ada dua poros kelompok yakni orang percaya dan Yahudi serta orang percaya dan non Yahudi. Ada dua tokoh yang juga ditonjolkan dalam Galatia yakni Petrus dan Paulus. Berkaitan dengan orang yang percaya ini pada tahun-tahun awal, mereka mengikuti Kristus dalam sebuah gerakan batin. Lihat saja pada perikop Kisah Para Rasul 3: 1, para pengikut Kristus, dan para pemimpin mereka khususnya, terus memelihara ritual pergi ke Bait Suci, bahkan setelah kematian Yesus.¹⁹ Sementara dua tokoh itu akan menampakkan ciri khas kaitannya dengan realitas dua kelompok sosial. Ada yang akan tetap teguh berpegang pada batas-batas sosial tetapi ada yang perlu melihat dan merobohkan batas-batas sosial yang ada.²⁰

Pola jemaat yang didirikan oleh Paulus dalam tradisi Yahudi tidak lepas dari pengaruh kehidupan sosial di kota Helenis. Misalnya berbentuk *collegia*, suatu perkumpulan orang yang satu kepentingan dan biasanya berkumpul dalam sebuah rumah (*domus*) dari anggota yang terkemuka.²¹ Seturut dengan kebiasaan itu, Paulus pun dapat mendirikan jemaat-jemaat di mana pun ia singgah (Kis 16:14-15,40). Tindakan semacam ini tentu tidak serta merta diambil alih begitu saja oleh Paulus, tetapi ia berupaya memodifikasi sesuai dengan tujuan Injil.

Dalam surat di Galatia, Petrus adalah tokoh yang menunjukkan model identitas kompartementalisasi dengan segala pergulatannya. Petrus merupakan seorang Yudea, ia mengetahui betul hukum tentang makan (makan *kosher*) orang Yahudi, dimana, orang Yudea tidak akan duduk di meja yang sama dengan orang non-Yahudi. Ketika Petrus mengunjungi Paulus di Antiokhia, setelah konsili di Yerusalem (Gal 2:11-14). Pada awalnya, Petrus duduk semeja dengan orang yang percaya tetapi non-Yahudi (Gal 2:14). Keadaan berubah ketika orang-orang dari Yerusalem, yang terkait dengan Yakobus saudara laki-laki Yesus, datang ke Antiokhia, Petrus segera memisahkan dirinya dari orang-orang non-Yahudi. Tindakan Petrus ini menunjukkan identitas sosial yang dimilikinya begitu eksklusif dan mendominasi serta hal ini khas Yudaisme

¹⁹ Kok, J., "Social Identity Complexity Theory as heuristic tool in New Testament Studies", *HTS Theologese Studies/Theological Studies*, 2014, hlm 5.

²⁰ Dalam perjanjian Baru, eksklusivitas kelompok itu dipecah oleh Yesus. Misalnya ada dalam interaksi antara Yesus dan perempuan Samaria (Yohanes 4: 1–42). Yesus terus memulai interaksi dengan yang lain. Ia melampaui identitas sosial, identitas agama dan batas-batas budaya yang memisahkan orang Yahudi dan Samaria selama berabad-abad.

²¹ Martin Harun, "Perjumpaan Injil dan Kebudayaan dalam Kerasulan Paulus" *Studia Philosophica et Theologica* Vol.16, No. 1 (Maret 2016), hlm 6.

pada saat itu (Im 17: 10–15).²² Tindakan ini memberi arti bahwa Petrus sebenarnya baru saja memperkuat batas eksklusif dan membedakan antara orang dalam (Yahudi) dan orang luar (non-Yahudi).

Paulus melihat tindakan Petrus sebagai kontradiktif dan eksklusif (Gal 2:14). Petrus berperilaku terkotak-kotak dan menyebabkan perpecahan serta pemisahan kembali. Petrus berkutut di antara Antiokhia-nya dan Yerusalem-nya. Hal ini tidak dapat dilihat sebagai karakteristik dari posisi *merger*. Paulus kritis terhadap Petrus karena ia sebagai panutan malah bertindak kompartementalisasi dan bukannya *merger*. Pemimpin bagaimanapun seharusnya bertindak dalam model *merger* karena merangkul semua kalangan bukan kompartementalisasi yang justru mengkotak-kotakkan. Akibat pilihannya, Petrus terombang-ambing, akan mana yang hendak dianutnya. Tidak hanya Petrus, tetapi para murid Petrus dan Paulus pun bingung melihat apa yang terjadi pada rasul Yerusalem itu. Bagi Paulus dalam Galatia 3:28, semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus, terlepas dari apakah seseorang tersebut adalah Yahudi atau Yunani, orang merdeka atau budak.

Perkembangan pribadi Paulus dan identitas sosialnya dicirikan dengan pluralitas dan identitas sosial yang kompleks. Paulus dibesarkan di Tarsus sebagai seorang Yahudi Diaspora (Kis. 22: 3). Pada tahap hidup selanjutnya, Paulus pergi ke Yerusalem dan dididik lebih lanjut di Yudea, di tengah lingkungan yang lebih konservatif di bawah Rabi Gamaliel, yang terkenal sebagai guru hukum lisan Yahudi. Beberapa tahun setelah kematian Kristus, dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus mengalami pewahyuan (pertobatan) yang ia ungkapkan sebagai momen perubahan radikal dalam hidupnya, yang semakin mengubah pergaulan, identitas dan rasa inklusivitasnya (Kis 9, Flp 3: 7–9).²³

Paulus sendiri pernah mewujudkan identitas Yudea eksklusif seperti yang diungkapkan dalam Filipi 3: 4–6. Akan tetapi dalam Galatia 1: 11–12, Paulus menjelaskan bahwa dia menerima wahyu dari atas yang membuka matanya dan secara radikal mengubah caranya melihat garis batas antara orang dalam (Yahudi) dan orang luar (non-Yahudi). Berdasarkan peristiwa pewahyuan ini, Paulus melihat visi akan pentingnya sebuah rekonsiliasi (2 Kor 5:17). Dengan semangat itu, Paulus mewujudkan etos inklusivitas itu yang tanpa batas bahkan ia nantinya dikenal sebagai rasul bagi

²² Dalam komentarnya, Kok menyatakan kalau tindakan Petrus menampakkan ada kalanya Petrus itu bertindak sebagai inklusif –‘Petrus Anthiokia’ dan eksklusif etnosentris-‘Petrus Yerusalem’. Lih Kok, J., “Social Identity Complexity Theory as heuristic tool in New Testament Studies”, hlm 6.

²³ Berkaitan peristiwa pertobatan, seringkali dipahami dengan berubahnya nama dari Saulus menjadi Paulus. Oleh pengarang Kisah Para Rasul, nama Saulus dan Paulus digunakan dalam strategi literer. Pengarang memilih untuk menggunakan nama ibrani Saulus selama tokohnya masih bergerak dalam lingkungan Yahudi dan memakai nama Romawi Paulus semenjak memulai misinya ke tengah bangsa non Yahudi. Lih. Martin Harun, OFM, *Riwayat Rasul Paulus*, dalam *Tak Berbatas, tak Bemegah*, editor: YM Seto Marsunu, (Jakarta: LAI, 2011), hlm 2.

non Yahudi. Kok menyitir pendapat Hans Dieter Betz, bahwa ia setuju mengenai tujuan utama Paulus di Galatia yakni mengarahkan orang yang percaya baik Yahudi maupun non Yahudi bahwa 'kalian semua adalah satu'.

Paulus ingin menyampaikan bahwa garis batas sosial yang lama telah usang dan perlu diganti dengan yang baru. Dengan demikian, tidak ada lagi batas yang memisahkan antara orang Yahudi dan Yunani antara budak dan orang merdeka karena batas itu telah dihapuskan. Visi kebaruan ini membutuhkan realitas sosial integratif baru yakni model penggabungan/*merger*, yang menganggap serius rencana Tuhan untuk ciptaan baru (Gal 6:15). Etnis Yudea menandai hal ini dengan orang dalam dan orang luar yang berbeda – misalnya perihal sunat - tidak dapat lagi berfungsi sebagai batas eksklusif tanda pembatas (Gal 5: 6; 6:15; Rm 2: 25–29; Kol 2:11; 3:11; Ef 2: 11–22).

Dalam model *merger*, kelompok yang satu dengan yang lain saling berdamai satu sama lain dan masuk dalam identitas baru sebagai satu kelompok. Artinya masing-masing kelompok saling menembus batas/sekat sosialnya dan menggabungkan keanekaragaman dalam sebuah kesatuan. Untuk tujuan ini, Paulus menggunakan ungkapan linguistik yang mewakili karakter penggabungan yakni bahasa seperti *ciptaan baru*, *Saudara dan saudari*, *kalian semua adalah satu* dan menolak bahasa serta praktik yang menghancurkan kesatuan ini (bdk. Gal 3:38; 1 Kor 12:13; Kol 3:11).²⁴

SICT Gal 5:23

Dalam Gal 5:23, penguasaan diri erat kaitannya dengan kuasa roh dan daging. Pandangan Rasul Paulus mengenai Roh (*pneuma*) dan daging (*sarks*) termasuk tubuh (*soma*), oleh sebagian besar ahli menunjukkan betapa aspek itu merupakan tiga realitas kepribadian manusia yang berbeda yang tidak terpisahkan. Penggunaan istilah ini merupakan cara Paulus untuk memahami totalitas kemanusiaan dari manusia itu sendiri.²⁵

Dalam Galatia, kata *sarks* bersifat duniawi (Gal 1:16). *Sarks* digunakan untuk menyatakan kemanusiaan manusia dalam kelemahannya. Dengan demikian jelas, Paulus tidak menggunakan *sarks* dalam kaitan amoralitas (jahat dan bertentangan dengan *pneuma*). Paulus dalam hal ini tidak menggunakan *sarks* dalam pengertian dualistis helenis. Meski pada umumnya *sarks* dianggap bertentangan dengan Allah dan sering pula dipertentangkan dengan *pneuma* (Gal 5:17).

Craigh S. Keener menyampaikan hal yang senada, bahwa daging dan Roh itu tampak dalam surat Galatia, terutama Gal 5: 19-26. Daging (*sarks*) dalam Perjanjian Lama dimengerti sebagai

²⁴ Kok, J., 2014, "Social Identity Complexity Theory as heuristic tool in New Testament Studies", hlm 8.

²⁵ Bambang Subandrijo, *Tubuh, Jiwa dan Roh dalam Pemikiran Paulus*, dalam buku *Tak Berbatas, tak Bemegah*, editor: YM Seto Marsunu, (Jakarta: LAI, 2011), hlm 21.

keterbatasan dari ciptaan bahkan kematian.²⁶ Sementara Roh dalam Perjanjian Lama dimengerti sebagai kerja Allah yang penuh ajaib. Paulus mengajarkan bahwa kehadiran Allah itu ada dalam roh yang memampukan seseorang untuk bertidak moral dengan baik dan merefleksikan karakter Allah. Daging (*sarks*) artinya bukan keadaan berdosa tetapi mau mengatakan bahwa manusia itu tanpa kekuatan Allah tetap lah daging.

Gal 5:13-26 bisa dipahami juga sebagai krisis yang tengah terjadi pada jemaat Galatia.²⁷ Krisis ini karena ada ketegangan dalam diri manusia antara hidup menurut roh atau menurut dirinya sendiri (*sarks*). Barangkali jemaat Galatia cenderung hidup berdasar *sarks*-nya sendiri. Maka dari itu, keadaan ini kemudian ditangkap oleh Paulus. Mereka dinasehati untuk berpegang pada Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, maka mereka akan menjadi orang yang merdeka.²⁸ Sementara dalam Gal 5:23 ditegaskan oleh Paulus orang yang merdeka itu akan berbuah hidupnya. Salah satu buah itu ialah penguasaan diri. Nasehat ini ditujukan kepada mereka orang merdeka yakni orang yang percaya baik Yahudi maupun non Yahudi.

St. Darmawijaya juga beranggapan bahwa nasihat Paulus untuk hidup dalam roh itu ada dalam kerangka menjawab persoalan konkret dan kontekstual yang dialami jemaat di Galatia. Orang merdeka ialah mereka yang dituntun oleh Roh. Maka, St. Darmawijaya membagi Surat Galatia demikian, Perikop Gal 5:1-12 adalah mengartikan dan memberi dasar kemerdekaan, perikop Gal 5:13-26 mempraktekkan kemerdekaan termasuk buah yang didapatkan sebagai orang merdeka.²⁹ Dengan kata lain orang yang mampu menguasai diri ialah orang yang merdeka. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang itu memampukan orang menjadi merdeka.

Lalu, apa arti orang merdeka itu? Dalam surat Galatia, jemaat itu diidentikkan seperti Hagar dan Sara. Keduanya adalah simbol orang yang merdeka dan budak (terkekang). Hagar ialah budak yang diasosiasikan sebagai daging, sementara, Sara ialah simbol kemerdekaan yang diasosiasikan sebagai Roh. Meskipun kemerdekaan dalam konteks Galatia lebih luas dari itu yakni merdeka dari hukum taurat karena konteksnya Paulus berhadapan dengan hukum taurat. Jemaat Galatia dipanggil untuk hidup dengan bebas, bebas dari kekangan hukum, kekangan dirinya sendiri (*sarks*) dan diminta menjadi pelayan dalam cinta Kristus. Inilah kelompok orang yang dalam Kristus. Orang hidup di kelompok Kristus ini akan hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,

²⁶ Craigh S. Keener, *The IVP Bible Background Commentary: New Testament*, (Illinois: Intervarsity Press, 1993), hlm 534-535.

²⁷ John Barton & John Muddiman (ed), *The Oxford Bible Commentary*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm 1163.

²⁸ Bernard O Ukwuegbu, "Paraenesis, Identity-defining Norms, or Both? Galatians 5:13-6:10 in the Light of Social Identity Theory", hlm 557.

²⁹ St. Darmawijaya, *Seluk beluk Kitab Suci*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 445.

kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri (Gal 5:22-23). Dengan demikian, orang yang merdeka ini hidupnya berbuah.³⁰

Sementara orang yang di luar Kristus hidupnya dalam perbudakan *sarks*. Istilahnya dalam metode SICT, seseorang itu punya identitas sebagai atau hidup di luar kelompok (Kristiani-pengikut Kristus).³¹ Paulus menjelaskan orang yang hidup di luar Kristus itu bertindak atas *sarks* nya sendiri dan masih terkait dengan hidup di bawah hukum taurat (Gal 5:18). Mereka hidup dalam kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya sehingga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah (Gal 5:21).

Penguasaan diri dalam Gal 5:23 merupakan buah dari *merger* orang yang percaya dengan Roh Kudus. Dengan demikian, wujud dari tindakan *merger* ini adalah hidup sebagai orang merdeka yang juga hidup dalam banyak buah roh seperti “..buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki” (Gal 5:22-26). Sebenarnya umat beriman Kristiani menjadi salah satu kumpulan orang-orang merdeka, karena mereka telah memilih untuk menjadi murid Kristus, yang artinya dengan sadar memilih Kristus dan menerima rahmat Roh Kudus pula dengan segenap hati, tenaga, jiwa dan pikiran (bdk. Mat 22:37).

Kendati demikian, sebagai orang merdeka, seperti halnya dalam Gal 5:23, penguasaan diri memang tidak sekali jadi melainkan terus berbenah dan berproses dengan latihan dan disiplin diri. Paulus mengungkapkan kalau hendak bertumbuh, orang harus berjuang. “*Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal*” (1 Tim 6:12).

KESIMPULAN

Gal 5:23 menawarkan konsep penguasaan diri yang mendalam. Penguasaan diri itu merupakan buah dari hidup yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Kesanggupan umat beriman Kristiani dalam membuat *merger* antara dirinya dengan Roh Kudus akan membuahkan penguasaan diri yang baik. Perikop ini tentu telah diperhitungkan oleh pengarang yakni Rasul Paulus. Kehidupan merasul dan mewartanya memberi inspirasi tersendiri untuk semakin mendarahdagingkan konsep penguasaan diri bagi jemaatnya. Betapa tidak, rasul Paulus menampakkan sebagai rasul yang menganut *merger* dan bukan kompartementalisasi bahkan menghilangkan dominasi. Bisa saja, sebagai rasul bagi

³⁰ Bernard O Ukwuegbu, “Paraenesis, Identity-defining Norms, or Both?”, hlm 540.

³¹ Bernard O Ukwuegbu, “Paraenesis, Identity-defining Norms, or Both?”, hlm 547.

orang non Yahudi, dengan kecakapannya, ia mendominasi secara pribadi maupun dalam ajarannya. Inilah pembacaan berdasarkan penafsiran atas teori Kompleksitas Identitas Sosial.

Penggunaan SICT dalam penafsiran ini telah memberi perspektif lain untuk membaca Gal 5:23. Pembaca semakin mudah memahami bahwa identitas Paulus yang menganut *merger* mempengaruhi jemaat di Galatia untuk juga menganut *merger* dengan Roh Kudus pula. Jemaat di Galatia khususnya diminta untuk menjauhi roh jahat atau tidak menuruti keinginan daging (*sarks*) untuk menjadi orang merdeka.

Insight Teologis

Dari uraian di atas, ternyata menyisakan tanda tanya dan persoalan yakni bagaimana caranya seseorang untuk *merger* seperti dalam Gal 5:23? Dan lagi, dalam konteks Indonesia seperti apa mau diaplikasikan? Dua pertanyaan ini menggiring penulis untuk melihat lebih jeli lagi. Roh Kudus bagi umat beriman Kristiani amat berperan penting. Kehadiran Roh Kudus sudah dialami sejak jemaat perdana dalam rupa lidah-lidah api (Kis 2:3-4) hingga disampaikan oleh Yesus sendiri. Ia menjanjikan kehadiran Roh Kudus untuk menyertai sampai akhir zaman (Mat 28:20). Selain dalam Sinoptik yakni pada Injil Yohanes pun, Yesus secara gamblang akan mengirim Roh Kudus atau Roh Penolong kepada para murid-Nya, *Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran* (Yoh 14:15-17a).

Untuk bisa *merger* dengan Roh Kudus, umat beriman mau tidak mau mesti menanggalkan keinginan duniawi dan menomorsatukan kekudusan. Mereka harus bertekun dalam persekutuan-paguyuban dengan sesama jemaat Kristiani. Rahmat baptisan yang telah diterima masing-masing menjadi ‘modal’ untuk semakin mempererat persaudaraan. Dalam Gereja tidak pernah habis cara-cara untuk melestarikan persekutuan dan paguyuban itu. Ada berbagai macam kelompok seperti misdinar/PPA, PIA-PIR, OMK, Kelompok Lektor, Kelompok Devosi dan masih banyak lagi. Di tempat-tempat inilah upaya membangun kekudusan dalam paguyuban ini terjalin. Sejatinya *kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh*”(Gal 5:25). Dengan demikian, apabila hidup diarahkan pada hal-hal baik dan berguna akan mempermudah Roh Kudus untuk berkarya (Rm 8:12-13, 2 Kor 6:4-5).

Dalam konteks Indonesia, *merger* antara seseorang dengan Roh Kudus ini mestinya berwujud. Bagaimana wujud itu? Seringkali kita mendengar dalam kehidupan menggereja dan berbangsa wejangan dari Mgr. Albertus Soegijapranata dengan istilah 100% Katolik 100% Indonesia. Orang Katolik tidak zamannya lagi *moncer* di dalam kandang tetapi mesti berguna pula bagi masyarakat dan negara. Semestinya, efek dari *merger* orang Katolik itu berdaya ubah untuk semakin

memasyarakat (mengkonkretkan nilai cinta kasih untuk hidup bersama). Apalagi, setiap orang Katolik itu warga Gereja sekaligus warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barton, John & John Muddiman (ed). *The Oxford Bible Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Bernard O Ukwuegbu, "Paraenesis, Identity-defining Norms, or Both? Galatians 5:13-6:10 in the Light of Social Identity Theory", *The Catholic Biblical Quarterly* Vol.70 No.3, (July 2008). Hal 538-559.
- Brewer, Marilyn B. "Social Identity Complexity and Acceptance of Diversity", *Journal the Psychology of Social and Cultural Diversity* (diedit oleh Richard J. Crisp), (2010). Hal 11-33.
- Bromiley, Geoffrey W. *Theological Dictionary of the New Testament ed by Gerhard Kittel and G. Friedrich*, (California: William Eedmans Publishing Company, 1985).
- Brown, Colin (Ed). *The New International Dictionary of New Testamen Theology Vol.1, (A-F)*, Michigan: Zondervan Publishing House, 1975. (494-496).
- Brown, Raymond E dkk, *The New Jerome Biblical Commentary* (New Jersey: Prentice Hall, 1990).
- Darmawijaya, Stanislaus. *Seluk beluk Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Eko Riyadi, Stanislaus. *Surat-surat Proto-Paulino, Buku Ajar*. Yogyakarta: FT USD, 2017.
- Evans, A. Craigh & Stanley E. Porter. *Dictionary of New Testament Background*. Leicester: Intervarsity Press, 2000.
- George Arthur B, *The Interpreter's Dictionary of the Bible* (Nashville: Abingdon Press, 1981).
- Harun, Martin, OFM. *Riwayat Rasul Paulus*, dalam buku *Tak Berbatas, tak Bemegah*, editor: YM Seto Marsunu, Jakarta: LAI, 2011.
- Harun, Martin, "Perjumpaan Injil dan Kebudayaan dalam Kerasulan Paulus" *Studia Philosophica et Theologica* Vol.16, No. 1 Maret (2016). Hal 1-16.
- Hunt, Elizabeth K., "Intergroup Conflict and Social Identity in Galatians: An Exegetical Analysis", *Journal of Biblical Perspectives in Leadership* 8, No. 1 (2018). Hal 236-247.
- Kittel, Gerhard & Gerhard Friedrich (Ed) (Transl. oleh: Geoffrey W. Bromiley). *Theological Dictionary Of The New Testament Abridged In One Volume*. USA:William B. Eerdmans Publishing Company,1985.
- Komisi Kitab Suci Kepausan. *Penafsiran Alkitab dalam Gereja*, terj. V. Indra Sanjaya, Pr. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Keck, Leander E dkk, *The New Interpreter's Bible Volume V* (USA: Abingdon Press, 1997).
- Kok, J., 'Social Identity Complexity Theory as heuristic tool in New Testament

- Studies', *jurnal HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, (2014). Hal 1-9.
- Mandaru, F. Hortensius. *Menerawang Paulus: Catatan Tentang Etika Membaca dan Eko-Etika*, dalam buku *Tak Berbatas, tak Bemegah*, editor: YM Seto Marsunu, Jakarta: LAI, 2011.
- Meyer, Michael J, "Dignity, Rights, Self-Control", *Journal ETHICS*, Vol. 99 October, Number 1 (1988). Hal 520-534.
- Roccas, Sonia & Marilyn B. Brewer, "The Open University of Israel, Social Identity Complexity", *Jurnal Personality and Social Psychology Review* Vol. 6, No. 2 (2002). Hal 88-106.
- Subandrijo, Bambang. *Tubuh, Jiwa dan Roh dalam Pemikiran Paulus*. dalam buku *Tak Berbatas, tak Bemegah*, editor: YM Seto Marsunu. Jakarta: LAI, 2011.
- https://www.preceptaustin.org/2_peter_16-7, dengan kata kunci *Self-Control*, diakses 16 September 2020, Pkl 12.00 WIB.

**POIN DIALOG INTERRELIGIUS YANG KORELASIONAL DAN BERTANGGUNG
JAWAB GLOBAL DALAM SEKOLAH LINTAS IMAN
(ANALISIS BERDASARKAN PEMIKIRAN PAUL F. KNITTER)**

Agustinus Rosario Daru Nelahi

Magister Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma
daru.nelahi@gmail.com

YB Prasetyantha

Dosen Magister Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma
prasetyantha@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of the Sekolah Lintas Iman (SLI, Cross-Faith School) as an interreligious dialogue program in the city of Yogyakarta in implementing a correlational and globally responsible dialogue. The main question to be answered is whether the activities carried out by SLI have reflected a correlational and globally responsible dialogue according to the Paul F. Knitter's concept. The author uses the theory of Paul F. Knitter's dialogue model contained in the book *One Earth Many Religions* as a theoretical basis to discover the points of interreligious dialogue contained in it. The research was conducted by distributing questionnaires to former participant, conducting interviews with facilitators, and library research. In this research, the author tries to find the points of interreligious dialogue that are correlational and globally responsible in SLI's activities, as well as looking for the contribution of SLI in Knitter's thinking.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekolah Lintas Iman sebagai program dialog interreligius di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah kegiatan yang dilakukan oleh SLI sudah mencerminkan dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global menurut konsep Knitter. Penulis menggunakan pemikiran model dialog Paul F. Knitter yang termuat dalam buku *One Earth Many Religions* sebagai landasan teori guna merumuskan poin-poin dialog interreligius yang terdapat di dalamnya. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada para alumni SLI, melakukan wawancara kepada fasilitator SLI, dan melakukan studi pustaka. Dalam penelitian, penulis berusaha menemukan pokok-pokok dialog interreligius yang korelasional dan bertanggung jawab global dalam kegiatan SLI, serta mencari sumbangsih SLI dalam pemikiran Knitter.

Keywords: *teologi dialog, Paul F. Knitter, dialog lintas iman, pluralisme, yogyakarta, indonesia*

PENDAHULUAN

Agama dan gerakan sosial tak bisa dipisahkan. Di satu sisi, demi mencapai tujuan dari gerakan sosial, diperlukan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, termasuk umat dari berbagai agama. Di sisi lain, umat dari berbagai agama perlu memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, dialog menjadi hal yang tak dapat dipisahkan. Perjumpaan dan dialog, baik intra maupun interreligius, penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan keselamatan dunia. Namun, dialog sendiri merupakan sebuah langkah awal. Tujuan akhirnya adalah bagaimana dialog yang dibangun dapat berdaya guna untuk mewujudkan keselamatan. Itulah mengapa Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta, menjadi lokasi

yang sangat relevan dalam pembahasan mengenai dialog interreligius. Fenomena pluralisme dan perjuangan mewujudkan kesejahteraan sosial yang kental di Kota Yogyakarta menjadikannya “laboratorium dialog” yang ideal. Dalam konteks tersebut, Sekolah Lintas Iman¹ hadir sebagai program pendidikan dialog interreligius yang diperuntukkan bagi para calon pemuka agama di Yogyakarta. Lewat SLI, diharapkan benih-benih inklusivitas dan semangat kerja sama dapat tertanam di tengah masyarakat Indonesia, sehingga dialog yang ideal dapat terwujud.

Dalam kerangka tersebut, karya tulis ini dibuat untuk menganalisis peran SLI sebagai program pendidikan dialog interreligius dalam mewujudkan dialog yang korelasional dan bertanggungjawab global dalam konteks Indonesia. Di sini, pemikiran teolog Paul F. Knitter mengenai dialog interreligius yang korelasional dan bertanggung jawab dipilih oleh penulis sebagai “pisau bedah”. Penulis menilai pemikiran Knitter yang dilatarbelakangi petualangan teologisnya sebagai seorang eksklusif, inklusif, pluralis, hingga bersentuhan dengan teologi pembebasan relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, terkhusus Kota Yogyakarta, seperti disebut di atas. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah pokok-pokok apa yang bisa diambil dari pemikiran Knitter mengenai dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global dalam buku *One Earth Many Religions?* Apakah kegiatan lintas agama yang dilakukan oleh SLI sudah mencerminkan dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global menurut konsep Knitter?

Dalam karya tulis ini, penulis berusaha menyarikan pokok-pokok dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global menurut buku *One Earth Many Religions* yang disusun oleh Knitter. Selain itu, penulis juga berupaya menggali pengalaman para inisiator, fasilitator, serta peserta SLI dalam usaha mereka mewujudkan dialog yang sesuai dengan konteks Indonesia dan Kota Yogyakarta. Dari pembahasan tersebut, penulis mencoba menarik kesimpulan soal bagaimana sumbangsih SLI dalam penanaman nilai-nilai dialog interreligius yang korelasional dan bertanggung jawab global seturut pemikiran Knitter.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian campuran dalam karya tulis ini. Metode penelitian kuantitatif digunakan penulis saat menghimpun data dari para alumni SLI lewat kuesioner. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan mewawancarai para fasilitator dan inisiator SLI. Alasan memilih metode ini adalah agar informasi yang didapat bisa terukur, objektif, dan komprehensif. Untuk melengkapi bagian kajian teori, penulis juga akan melakukan studi pustaka. Buku acuan yang digunakan penulis adalah *One Earth Many Religions* karangan Knitter yang akan dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang terkait, guna memperoleh wawasan yang menyeluruh baik secara filosofis, teologis, maupun pastoral.

Penelitian pertama-tama akan dilaksanakan di Institut DIAN-Interfidei, tempat kegiatan SLI pertama kali dilaksanakan dan tempat di mana arsip kegiatan SLI disimpan. Di sana, penulis akan

¹ Selanjutnya disebut SLI

melihat arsip SLI untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan dialog yang dilakukan oleh SLI. Selain itu, penulis juga akan mengikuti beberapa kegiatan SLI untuk mendapat panorama bagaimana program ini dilaksanakan. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui surat elektronik kepada alumni SLI I-X, dengan 14 orang alumni memberikan umpan balik. Sedangkan fasilitator SLI yang berhasil diwawancarai ada lima orang, yakni Rm. YB Prasetyantha MSF (fasilitator SLI dari Universitas Sanata Dharma²), Ibu Elga Sarapung (direktur Institut DIAN-Interfidei⁴, sekaligus inisiator dan fasilitator SLI)⁵, Bapak Wahyu Nugroho (fasilitator SLI dari Universitas Kristen Duta Wacana⁶), Bapak Yusak Tri Darmanto (mantan fasilitator SLI dari UKDW, sekaligus inisiator SLI)⁸, dan Bapak Waryono (mantan fasilitator SLI dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta⁹ yang juga merupakan inisiator SLI)¹⁰. Penulis juga melengkapi karya tulis melalui wawancara Rm. Martinus Joko Lelono, alumni SLI, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan di Kevikepan Jogja Timur Keuskupan Agung Semarang¹¹.

Sekolah Lintas Iman dan Indonesia sebagai Konteks

Pluralitas dan multikulturalitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika sedang membahas mengenai Gereja (di) Asia. Sejak sidang FABC pertama pada tahun 1974, para uskup Asia telah menyadari bahwa ada tiga tugas khusus yang harus diemban oleh Gereja Asia, yaitu (1) berada bersama-sama dengan agama-agama Asia dalam dialog, (2) berada bersama-sama dengan kebudayaan-kebudayaan Asia dalam inkulturasi, dan (3) berada bersama-sama dengan kaum miskin Asia guna menggapai martabat manusia. Dengan kata lain, Gereja Asia dipanggil untuk memasuki suatu dialog kehidupan dengan agama-agama, kebudayaan-kebudayaan, dan kaum miskin Asia.¹²

Berhadapan dengan situasi pluralitas dan multikulturalitas yang ada di Asia, kerukunan antarumat beragama menjadi topik yang hangat dibicarakan, tidak terkecuali di Indonesia. Terlebih, Indonesia mengusung dari semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti “Berbeda-beda namun tetap satu”. Perbedaan suku, agama, etnis, dan budaya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan

² Selanjutnya disingkat USD.

³ Wawancara dengan Rm. Y.B. Prasetyantha, MSF (selanjutnya disingkat Romo Pras) dilakukan pada hari Senin, 21 September 2020, pukul 10.43-11.50 WIB di kampus Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma.

⁴ Selanjutnya disingkat Interfidei

⁵ Wawancara dengan Ibu Elga Sarapung (selanjutnya disebut Ibu Elga) dilakukan melalui aplikasi zoom pada hari Jumat, 2 Oktober 2020, pukul 11.33-12.10 WIB.

⁶ Selanjutnya disingkat UKDW.

⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho (selanjutnya disebut Bapak Wahyu) dilakukan melalui panggilan suara aplikasi Whatsapp pada hari Jumat, 9 Oktober 2020, pukul 11.45-12.24 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Yusak Tri Darmanto (selanjutnya disebut Bapak Yusak) dilakukan melalui panggilan video aplikasi Whatsapp pada hari Senin, 12 Oktober 2020, pukul 10.58-11.49 WIB.

⁹ Selanjutnya disingkat UIN.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Waryono dilakukan melalui panggilan suara aplikasi Whatsapp pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 08.16-08.47 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Romo Joko Lelono (selanjutnya disebut Romo Joko) dilakukan melalui panggilan video aplikasi Whatsapp pada hari Selasa, 23 Februari 2021 pukul 12.31-13.24 WIB.

¹² F. X. Clark, *Gereja Katolik di Asia: Sebuah Pengantar*, (Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Jansen, 2001), 46.

dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sayangnya, perbedaan ini tidak selalu dapat dimaknai secara positif oleh warga Indonesia. Maraknya kasus politisasi agama dan kasus intoleransi adalah hal-hal yang sulit dihindarkan dari kondisi masyarakat yang begitu majemuk. Walaupun demikian, keberagaman ini di sisi lain juga dapat dipandang secara positif, yaitu bahwa keunikan yang dimiliki setiap anggota masyarakat dapat saling melengkapi sehingga kehidupan bermasyarakat penuh dengan penerimaan dan kerukunan. Sisi positif inilah yang harus dimanfaatkan agar perubahan sosial bisa terjadi secara optimal dengan kerja sama dan relasi yang erat antar-umat beragama.

Melihat kondisi Indonesia yang sarat dengan pluralitas, usaha untuk mengelola keberagaman menjadi kekuatan adalah hal yang niscaya harus dilakukan. Usaha ini dapat dilakukan, misalnya melalui kegiatan-kegiatan formal seperti kurikulum di sekolah, maupun kegiatan-kegiatan informal seperti sarasehan lintas agama dan dialog-dialog. Situasi kota Yogyakarta, sebagai miniatur Indonesia, di mana banyak pendatang yang berasal dari berbagai macam latarbelakang dan daerah asal, membutuhkan penanganan secara khusus. Salah satu yang kelompok yang berusaha melakukannya adalah SLI yang dimulai pada tahun 2010. Pada edisi pertama, kegiatan ini diadakan di Semester Gasal. Selanjutnya, mulai SLI II hingga XII, kegiatan diadakan pada setiap semester genap, dari bulan Februari sampai Juni, pada hari Sabtu jam 9 sampai 12. Program ini dinamakan “Dialog dalam Aksi” karena prosesnya berlangsung bersama dengan komunitas atau lembaga yang bekerja sesuai tema. Kurikulum dalam program ini terdiri dari 60 persen kunjungan lapangan, 30 persen refleksi, dan 10 persen orientasi. Program ini terlaksana atas kerjasama antara Interfidei dengan tiga perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Fakultas Teologi USD, Fakultas Teologi UKDW, dan Fakultas Ushuludin UIN. Selain itu, dalam beberapa SLI ada juga peserta lain yang berasal di luar tiga universitas tersebut, seperti Universitas Gajah Mada (UGM). Jumlah maksimal mahasiswa dalam program ini adalah 30 orang, dengan masing-masing perguruan tinggi mengirimkan 8 orang, dan Interfidei mengirimkan 6 orang, yang biasanya merupakan perwakilan dari Hindu, Buddha, dan agama lain.¹³

Poin-poin Dialog Korelasional dan Bertanggung Jawab Global dalam Pemikiran Paul F. Knitter

Knitter adalah teolog asal Amerika Serikat yang lahir pada 25 Februari 1939. Kisah hidup Knitter terbilang unik karena dirinya pernah mengalami empat tahap petualangan religius yang membentuk pemikiran teologisnya. Keempat tahap tersebut yakni eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, serta pluralisme dan teologi pembebasan. Tahap eksklusivisme dirasakan Knitter di awal kiprahnya sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah (dikenal dengan Societas Verbi Divini atau SVD). Knitter lantas mengembangkan pemikiran teologisnya dan menjadi seorang inklusivis pada masa Konsili Vatikan II, ketika dirinya banyak dipengaruhi pemikiran Karl Rahner. Pemikiran Knitter kembali berkembang menjadi bercorak pluralis saat berjumpa dengan mahasiswa asal Pakistan,

¹³ Data-data mengenai SLI didapat penulis dari Term of References (ToR) dan Memorandum of Understanding (MoU) SLI yang diberikan oleh Interfidei.

Rahim, yang mendorongnya mengakui adanya keselamatan di agama-agama non-kristiani. Terakhir, pandangan teologisnya kembali berkembang saat bersentuhan dengan Gereja di Amerika Latin yang kental dengan Teologi Pembebasan yang membuatnya tersadar bahwa “dialog” dan “pembebasan” merupakan dua segi dari agenda yang sama. Hal inilah yang membuatnya menulis buku *One Earth Many Religions*, karya pertama Knitter yang menyebut dialog korelasional dan bertanggung jawab global sebagai ungkapan khasnya dalam menjelaskan dialog yang ideal.¹⁴

Knitter bukanlah satu-satunya teolog yang memiliki pemikiran mengenai dialog interreligius. Beberapa orang – baik sebelum maupun sesudah Knitter – memiliki pendapat sendiri mengenai terminologi ini. Knitter mendeskripsikan dialog interreligius sebagai perjumpaan dengan perbedaan yang berbicara, membingungkan, dan bahkan mengancam pada saat yang sama, serta keyakinan bahwa dalam banyak kasus perbedaan adalah sahabat, bukan musuh, dan menghasilkan buah, bukan membinasakan¹⁵. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam dialog tidak akan merasa takut, melainkan percaya sepenuhnya bahwa masing-masing dapat saling berbicara, belajar, bahkan bekerja bersama. Kepercayaan inilah yang menjadi inti dari dialog¹⁶.

Dalam pembahasan mengenai dialog interreligius yang korelasional, Knitter mengusulkan dua poin penting untuk diusahakan, yakni 1) *pengakuan akan adanya pluralitas* dan 2) *dilakukan dalam suatu komunitas yang egaliter*. Pengakuan akan pluralitas yang dimaksud Knitter di sini bukan hanya karena pluralitas itu dalam dirinya baik, tapi karena memang ini fakta dalam kehidupan dan alat untuk membangun hubungan¹⁷. Model dialog ini mengupayakan adanya hubungan dialogis yang otentik dan benar-benar bersifat dua arah di antara para penganut agama di dunia. Dialog ini mesti dilakukan dalam komunitas yang egaliter, di mana para peserta saling mengemukakan pendapat serta kebenaran, tidak satu pun boleh mengemukakannya dari satu posisi teologis yang mengklaim dominasi agamanya atas Yang Lain atau menghakimi Yang Lain¹⁸. Dengan kata lain, dialog korelasional tidak bisa dilakukan kalau satu agama mengklaim kekuasaan atau superior dalam segala hal atau selalu yang membuat norma terakhir yang menyingkirkan norma-norma lainnya¹⁹.

Sekadar mengakui pluralitas dan menjunjung tinggi kesetaraan ternyata tidak cukup bagi Knitter. Itulah sebabnya Knitter akhirnya memutuskan menulis buku *One Earth Many Religions* untuk memperkenalkan suatu cara yang paling efektif dalam melaksanakan dialog interreligius, yakni

¹⁴ Paragraf ini disarikan penulis dari P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 3-18.

¹⁵ C. H. Grundmann, *Interreligious Dialogue: An Anthology of Voices Bridging Cultural and Religious Divides*, (MN: Anselm Academic, 2015), 25, diunduh dari <https://anselmacademic.org/wp-content/uploads/2016/05/7067-interreligious-Dialogue-Read-Excerpts-button-2.pdf> pada Jumat, 5 Juni 2020 pukul 14.21 WIB.

¹⁶ C. H. Grundmann, *Interreligious Dialogue: An Anthology of Voices Bridging Cultural and Religious Divides*, 25.

¹⁷ P. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggungjawab Global*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2001), 22.

¹⁸ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 22.

¹⁹ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 22.

dengan mengupayakan agar dialog itu menjadi dialog yang bertanggung jawab global²⁰. Unsur pertama dari dialog bertanggung jawab global adalah *bercorak soteriosentris*. Dengan perubahan ini, dasar untuk berdialog menurut Knitter bukan lagi Kenyataan Tertinggi (yang biasa disebut sebagai Allah), melainkan tanggung jawab global terhadap kesejahteraan bersama²¹. Hal ini membawa kita ke unsur kedua dialog bertanggung jawab global, yakni *Etika Global sebagai dasar keselamatan*. Rumusan etika global bukanlah pemikiran asli Knitter. Hans Küng terlebih dahulu menggunakannya saat menulis *Global Responsibility: In Search of A New World Ethic* pada tahun 1991. Argumen Küng sederhana: tanpa etika dasar ini, kelompok-kelompok berbeda yang menghadapi masalah bersama tidak bisa bertindak bersama dan karena itu tidak dapat hidup bersama. Untuk itu, Küng mendesak dirumuskannya suatu konsensus etis, yang tidak “ketat” atau “total”, melainkan “tumpang tindih”, sehingga konsensus ini bisa menjadi “etika dunia”, suatu dasar moral yang di atasnya bangsa-bangsa dapat merumuskan tindakan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama²². Terakhir, *perhatian pada suara para korban* menjadi unsur yang membuat pemikiran Knitter selangkah lebih maju dibandingkan Küng. Knitter menyoroti peran para korban yang dapat mendobrak maupun mengalihkan arah pembicaraan dalam dialog. Pengalaman mereka yang berbeda secara budaya dan agama, ataupun tersingkir secara sosial dan politik sangat berharga guna membangun dialog yang “membumi” dan tidak sekadar teoretis, namun langsung bertujuan mewujudkan keselamatan dengan mengurangi penderitaan para korban.

PEMBAHASAN

Dari poin-poin dialog korelasional dan bertanggung jawab global yang telah ditemukan, penulis mencoba memperdalamnya lewat wawancara mendalam dengan para fasilitator SLI dan menyebar kuesioner kepada para alumni SLI. Tujuan dari pendalaman ini adalah mencari tahu apakah poin-poin dialog interreligius yang korelasional dan bertanggung jawab global dapat ditemukan dalam kegiatan SLI.

Poin-poin Dialog Korelasional dalam SLI

Pengakuan akan Adanya Pluralitas dalam SLI

Sejak awal berdiri, SLI telah dirancang sebagai program yang melibatkan para partisipan dari berbagai macam golongan dan agama. Ketika pertama kali diadakan pada tahun 2009, SLI sudah melibatkan tiga instansi, yakni UIN sebagai perwakilan umat Islam, UKDW sebagai perwakilan Kristen Protestan, serta Interfidei sebagai perwakilan kelompok lintas iman. Sedangkan perwakilan dari agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu saat itu belum berpartisipasi dikarenakan alasan-alasan khusus. Romo Pras selaku fasilitator SLI dari USD mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak

²⁰ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 23.

²¹ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 24.

²² P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 102.

Katolik sudah diajak untuk berpartisipasi dalam SLI I. Namun, karena alasan belum adanya pendamping, maka USD absen dari penyelenggaraan SLI. Sementara itu, menurut Ibu Elga, terhambatnya keikutsertaan pihak Hindu, Buddha, dan Konghucu lebih dikarenakan masalah teknis.

Pengakuan akan adanya pluralitas telah dilakukan oleh SLI sejak awal melalui inisiatif para inisiatornya dalam mengajak peserta dari semua agama untuk berpartisipasi. Pengakuan ini bahkan juga telah ditampakkan oleh tiga figur inisiator, yakni Ibu Elga, Bapak Waryono, serta Bapak Yusak yang mewakili kelompok agama Kristiani dan juga Islam. Tak hanya para inisiator, para alumni SLI yang memberikan respons terhadap kuesioner penulis juga mengatakan bahwa penghargaan terhadap perbedaan merupakan hal yang paling banyak dirasakan selama mengikuti SLI (lihat tabel 1).

Nilai-nilai yang didapat alumni SLI	Jumlah
Penghargaan akan Perbedaan	14
Suasana Persahabatan dengan Sesama Peserta	13
Kedekatan dengan Fasilitator	8
Bertambahnya Wawasan mengenai Peserta dari Fakultas Maupun Agama Lain	13
Keberanian untuk Membuka Diri dalam Dialog	13
Kesempatan yang Sama di Antara Para Peserta untuk Mengemukakan Pendapat	11
Dialog yang Mengarah pada Pemecahan Persoalan Sosial yang Dibahas	10
Adanya Komitmen pada Budaya Non-kekerasan, Solidaritas, Toleransi, Kesejajaran Hak Perempuan dan Laki-laki	10
Adanya Perhatian pada Suara para Korban	7

Tabel 1. Tanggapan responden atas pertanyaan “Apakah Anda merasakan hal-hal ini selama mengikuti penyelenggaraan SLI?”

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa aspek penghargaan akan perbedaan merupakan hal yang paling banyak dialami oleh para alumni SLI. Patut dicatat bahwa jumlah responden yang memberikan tanggapan berjumlah 14 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua peserta merasakan hal ini. Tingginya penghargaan akan perbedaan ini kemudian menjadi langkah awal bagi para peserta untuk kemudian berani untuk membuka diri dalam dialog (13 tanggapan), menambah wawasan tentang peserta dari fakultas dan agama lain (13 tanggapan), serta membangun suasana persahabatan dengan peserta lain (13 tanggapan). Dengan demikian, para peserta memahami bahwa pengakuan akan pluralitas bukan semata-mata terbatas pada penerimaan akan perbedaan, melainkan

juga mengupayakan adanya hubungan dialogis yang otentik dan benar-benar bersifat dua arah, seperti dianalogikan Knitter dengan hubungan antara teman dan rekan kerja.²³ Hubungan inilah, yang menurut Knitter, memungkinkan semua peserta berbicara secara jujur dan saling mendengarkan.

Tak hanya para peserta, para fasilitator pun memiliki perspektif yang sama. Sebagai “konseptor” SLI, para fasilitator juga menyetujui bahwa kegiatan ini tidak sekadar bermuara pada penghargaan akan perbedaan. Bapak Yusak, misalnya, menyebutkan bahwa SLI diharapkan mampu membuat para peserta “membangun relasi lintas iman bebas prasangka di dalam keterbukaan, saling menghormati, kita juga mau bekerjasama”.²⁴ Senada dengan Bapak Yusak, Bapak Waryono juga mengungkapkan bahwa ide dasar diselenggarakannya SLI adalah untuk “merekrut anak muda, yang notabene mahasiswa, untuk saling mengenal, saling memperkaya pengalaman imannya sehingga kemudian imun (kebal) terhadap isu-isu yang mungkin kurang relevan dengan relasi antaragama terutama lingkup Jogja.”²⁵ Romo Pras kemudian merangkum proses saling mengenal di antara para peserta yang berbeda latar belakang ini dengan satu kata: perjumpaan. Dalam perjumpaan inilah para peserta SLI mendapat kesempatan untuk “saling mempertanyakan dan menjelaskan posisi masing-masing, tetapi dalam arti tertentu juga bersama-sama memikirkan persoalan negara, bersama, persoalan sosial”.²⁶

Berkaitan dengan hal ini, Knitter, dalam *One Earth Many Religions*, telah menulis bahwa dialog sendiri selalu merupakan langkah kedua.²⁷ Langkah pertama selalu merupakan perjumpaan yang dimulai pada tingkat praksis yang liberatif yang sedang dibicarakan. Oleh karenanya, peserta dialog tidak mulai dengan percakapan mengenai doktrin atau ritus, bahkan tidak juga doa dan meditasi.²⁸ Pada kenyataannya, para fasilitator dan peserta SLI pun merasakan dan mengalami bahwa jalan masuk yang dipilih untuk bisa berdialog bukanlah melalui diskusi mengenai doktrin-doktrin teologis. Dalam SLI, jalan masuk yang dipilih tersebut adalah *udar prasangka*, yaitu sebuah proses mengutarakan prasangka-prasangka yang dirasakan oleh masing-masing peserta terhadap agama lain, baik secara komunal, di dalam kelompok, maupun secara pribadi. Proses ini selalu dilakukan di awal program SLI, yang kemudian diharapkan untuk berlanjut hingga akhir. Dalam *udar prasangka* ini, para peserta dapat mengatakan dan menanyakan apapun tentang agama lain, baik yang positif maupun yang negatif, untuk kemudian dijelaskan oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Salah satu inisiator SLI, Bapak Yusak, dalam wawancara menyebut bahwa justru yang menjadi paradigma awal ketika mendirikan SLI itu adalah keprihatinan karena selama ini orang-orang beragama itu hidup dalam bayang-bayang prasangka yang tidak selalu benar.²⁹ *Udar prasangka* ini lantas dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masing-masing penganut agama yang ikut dalam SLI itu menceritakan

²³ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 22.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yusak.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Waryono.

²⁶ Wawancara dengan Romo Pras.

²⁷ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 199.

²⁸ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 200.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Yusak.

apa sesungguhnya yang diajarkan dan diimani dalam agama tersebut. Sementara itu, narasumber lain, Romo Joko, menegaskan bahwa *udar prasangka* adalah upaya mengatasi hambatan utama dalam dialog, yakni prasangka.

Senada dengan para fasilitator, proses *udar prasangka* ini ternyata juga dianggap sebagai proses yang penting oleh para peserta. Dalam tabel 2 yang ditampilkan di bawah ini, tampak bahwa *udar prasangka* menduduki peringkat dua sebagai kegiatan yang paling berkesan selama mengikuti SLI, di bawah refleksi atau kerja kelompok.

Jenis Kegiatan	Jumlah
Pembukaan/Penutupan	7
<i>Udar Prasangka</i>	10
Pemberian Materi oleh Narasumber	8
Studium Generale	6
Refleksi/Kerja Kelompok	11
Live-in	9

Tabel 2 Tanggapan responden atas pertanyaan “Kegiatan apa dari SLI yang Anda ikuti yang paling berkesan?”

Bagi penulis, kegiatan *udar prasangka* ini justru melengkapi pemikiran Knitter mengenai pentingnya pengakuan akan adanya pluralitas dalam dialog. Gagasan teoretis Knitter untuk mengawali dialog dengan perjumpaan dalam tataran praksis akhirnya benar-benar diterapkan SLI melalui proses *udar prasangka*. SLI beranjak lebih jauh dari persoalan *soteria* (keselamatan) yang menjadi *common ground* untuk membangun dialog dalam pemikiran Knitter. Dalam SLI, upaya untuk mewujudkan dialog yang mengarah pada keselamatan diwujudkan dengan terlebih dahulu membebaskan diri dari berbagai macam prasangka. Dengan kata lain, sebelum membahas mengenai bagaimana mewujudkan keselamatan, masing-masing peserta dialog difasilitasi saling mengenal satu sama lain melalui perjumpaan, yang dalam SLI secara khusus disistematisasi dalam proses *udar prasangka*. Harapannya, melalui metode ini, perbedaan-perbedaan yang ada di antara para peserta tidak hanya diakui, namun juga diterima. Perbedaan tidak lagi dilihat sebagai hal yang menghancurkan, namun justru sebagai hal yang mendukung dalam membangun dialog, karena dengan perbedaan tersebut masing-masing peserta akan diperkaya dengan pemikiran-pemikiran orang lain.

SLI sebagai Komunitas yang Egaliter

Ada setidaknya empat unsur yang selalu ada dalam setiap SLI, yakni peserta, fasilitator, narasumber, serta panitia. Tentu, keempatnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga secara kasat mata sulit untuk melihat SLI sebagai komunitas yang egaliter. Peran para peserta

tentunya berbeda dengan para fasilitator. Jika para peserta hanya mengikuti satu SLI, maka fasilitator akan terus mendampingi dalam beberapa SLI. Demikian juga para narasumber tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian acara SLI, karena hanya mengisi satu pokok pembahasan, tidak seperti para peserta, fasilitator, dan panitia yang berpartisipasi dari awal sampai akhir. Maka, prinsip egaliter dalam SLI tidak dilihat dari aspek peran dan fungsi keempat unsur yang ada dalam SLI. Prinsip egaliter ini berkaitan erat dengan poin penghargaan akan perbedaan yang telah dibahas sebelum ini, di mana setiap kelompok agama yang berpartisipasi memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Hal ini terjadi baik di antara sesama fasilitator maupun sesama peserta.

Di tingkat fasilitator, prinsip egaliter tampak, misalnya dalam penyusunan program SLI setiap tahunnya. Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada para fasilitator, ditemukan bahwa ada mekanisme yang kurang lebih sama, kendati dibahasakan secara berbeda oleh setiap fasilitator, yakni (1) perumusan tema, (2) penyusunan *term of reference* (TOR), (3) pelaksanaan teknis oleh panitia, dan (4) evaluasi. Dari pemaparan tahap-tahap tersebut, tampak bahwa para fasilitator sebagai SC memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada fasilitator yang memiliki keistimewaan maupun kecenderungan untuk mendominasi. Dalam keputusan-keputusan krusial seperti perumusan tema pun, semua fasilitator memiliki hak bicara yang sama.

Tak hanya para fasilitator, para peserta pun merasakan prinsip egaliter ini sepanjang mengikuti SLI. Jika melihat kembali informasi yang terdapat pada tabel 1, ditemukan bahwa 11 dari 14 responden merasakan adanya kesempatan yang sama di antara para peserta untuk mengemukakan pendapat. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang positif, di mana para peserta SLI tidak merasakan adanya diskriminasi dalam berpendapat. Penulis merasa, adanya proses *udar prasangka* berpengaruh besar terhadap keutamaan ini. Keberanian mengutarakan prasangka yang dipupuk melalui proses *udar prasangka* yang berlangsung sepanjang SLI ternyata juga menimbulkan keberanian untuk mengungkapkan pendapat tanpa merasa terdiskriminasi. Alih-alih saling mendominasi, para peserta justru mampu belajar banyak dari peserta lain yang berasal dari agama maupun fakultas yang berbeda, seperti yang juga ditunjukkan dalam tabel 1. Prinsip egaliter ini kemudian mendukung salah satu tujuan SLI, yakni untuk mengkaitkan isu-isu aktual di masyarakat dalam perbincangan-perbincangan yang sifatnya interreligius.³⁰ Secara real, usaha merelevansikan agama atau teologi dengan isu-isu aktual di masyarakat ini terjadi pada saat refleksi atau kerja kelompok, yang merupakan kegiatan yang paling berkesan menurut para responden (11 dari 14 tanggapan) menurut data dari tabel 1. Dalam refleksi atau kerja kelompok ini, komunikasi yang baik tidak akan terjadi apabila di antara peserta ada kecenderungan salah satu agama untuk mendominasi.

Salah satu narasumber, Bapak Yusak, menegaskan pentingnya prinsip egaliter ini dengan menyebut agama sebagai “*agemaning sukma* (pakaian jiwa) ... memiliki fungsi yang sama, yakni

³⁰ Wawancara dengan Bapak Wahyu.

mewujudkan kebaikan, ... tidak perlu dipersoalkan oleh sesama pemeluknya.³¹ Pernyataan ini, juga praktik yang terjadi dalam proses SLI, mengafirmasi pemikiran Knitter yang menyatakan bahwa tidak satu pun (pihak) boleh mengemukakan dari satu posisi teologis yang mengklaim dominasi agamanya atas Yang Lain atau menghakimi Yang Lain.³² Seluruh peserta dan fasilitator mencoba untuk saling “berbicara satu sama lain dengan menerobos tembok-tembok penghalang religius”³³ sehingga dengan demikian para pelaku dialog dapat mengembangkan pemahaman mereka akan realitas, dalam rangka menemukan kebenaran.³⁴ Penerimaan akan perbedaan yang berujung pada persamaan hak untuk bersuara dengan sendirinya menjadikan SLI sebagai komunitas dialog yang korelasional seturut pemikiran Knitter. Bahkan, tak hanya mengafirmasi pemikiran Knitter, SLI juga melengkapinya dengan proses *udar prasangka* serta pendasaran pada budaya Jawa, yang menjadikan dialog korelasional dalam SLI lebih bumi dan mudah dipahami.

Poin-poin Dialog Bertanggungjawab Global dalam SLI

Corak Soteriosentris dalam SLI

Corak soteriosentris merupakan salah satu kekhasan SLI dibandingkan dengan kelompok dialog yang lainnya. Sejak awal diadakan, para inisiator telah merancang SLI sebagai kelompok dialog yang membahas permasalahan sosial-aktual di masyarakat dengan pendekatan lintas iman. Dasar berdialog bukan pertama-tama ajaran agama atau pemikiran teologis, namun justru diawali dengan mengangkat suatu keprihatinan maupun isu tertentu yang sedang berkembang di masyarakat. Berbagai macam tema, seperti filantropi (SLI I), lingkungan (SLI II), kaum difabel (SLI VI), LGBT (SLI VII), hingga toleransi dan hidup kebangsaan telah dijadikan pokok pembahasan dalam SLI, yang kesemuanya mengarah pada usaha mewujudkan hidup bermasyarakat yang lebih baik.

Sebagai komunitas lintas iman, SLI memang tidak pertama-pertama berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial. Salah satu tujuan SLI menurut nota kesepahaman (MoU) yang disusun pada tahun 2018 ialah bersama-sama ikut mengambil bagian dalam tanggung jawab mempersiapkan calon-calon cendekiawan dan pimpinan umat/komunitas yang berwawasan pluralisme dan multikultur bagi terwujudnya kehidupan bersama yang saling menghargai. Hal ini dikuatkan dengan informasi yang didapat dari para narasumber. Ibu Elga, sebagai salah satu inisiator SLI menyebutkan bahwa “idena juga dalam rangka bagaimana calon-calon pimpinan agama-agama bisa mengerti, bisa sensitif dengan isu-isu sosial masyarakat. Jadi mereka tidak hanya akan menjadi pendeta, romo, ustadz, atau kyai yang sibuk dengan aktivitas internal.”³⁵

³¹ Wawancara dengan Bapak Yusak.

³² P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 22

³³ C. H. Grundmann, *Interreligious Dialogue: An Anthology of Voices Bridging Cultural and Religious Divides*, 27.

³⁴ C. H. Grundmann, *Interreligious Dialogue: An Anthology of Voices Bridging Cultural and Religious Divides*, 28.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Elga.

Dari rumusan MoU serta ungkapan para narasumber, penulis menyimpulkan bahwa sumbangan SLI bagi persoalan-persoalan sosial adalah justru dengan menanamkan perspektif baru dalam menanggapi isu-isu aktual di masyarakat. Perspektif baru tersebut adalah keterbukaan dan lintas iman. Satu persoalan tidak lagi hanya dilihat dari satu sudut pandang, namun dengan mempertimbangkan pula pandangan berbagai pihak, baik yang berlainan agama maupun latar belakang. Bertumbuhnya perspektif inklusif inilah yang diakui oleh para narasumber menjadi keutamaan yang dimiliki oleh para alumni SLI.³⁶

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh inisiator dan mantan fasilitator SLI dari UIN, yakni Bapak Waryono. Jika dari kelompok agama Kristen Protestan (diwakili oleh UKDW dan Ibu Elga) dan Katolik (diwakili oleh USD) tidak terlalu menyoroti soal pemecahan persoalan-persoalan sosial masyarakat, pihak agama Islam justru memberi bobot yang lebih pada hal ini. Dikutip dari wawancara dengan Bapak Waryono, beliau mengungkapkan bahwa “diskursus soal kepercayaan atau iman itu sudah selesai ... jadi justru kalau ke depan itu saya kalau misalnya masih ada itu bukan untuk lebih kepada dialognya, ya, tapi justru pada *action*.”³⁷ Perbedaan pandangan mengenai dialog ini justru melengkapi apa yang telah terjadi dalam SLI. Pandangan pihak Islam dengan demikian memperkuat dimensi praktis dalam SLI, yakni untuk mengambil langkah nyata dalam setiap penyelenggaraan SLI, dan tidak hanya berhenti pada penanaman perspektif inklusif.

Sementara itu, dari sisi peserta SLI, corak soteriosentris sudah dirasakan, misalnya melalui dialog yang mengarah pada pemecahan persoalan yang dibahas. Dalam tabel 1, terlihat bahwa 10 dari 14 responden telah merasakan hal tersebut sepanjang penyelenggaraan SLI yang mereka ikuti. Arah dan pusat dialog yang dilakukan dalam SLI tidak lagi teologi, melainkan keselamatan yang mewujudkan dalam solusi atas persoalan yang dibahas. Terlebih, dalam setiap SLI selalu diadakan pembagian kelompok lintas agama dan lintas fakultas untuk melakukan refleksi, yang merupakan kegiatan yang paling berkesan bagi para responden. Dengan demikian, setiap peserta sebenarnya sudah dikondisikan untuk bisa saling bekerjasama untuk membuat refleksi dari setiap materi.

Corak soteriosentris dalam SLI tampak bukan pertama-tama dalam sumbangsuhnya dalam memberi solusi atas berbagai permasalahan sosial. SLI tetap setia kepada visinya sebagai kelompok diskusi interreligius, bukan sebagai gerakan sosial. Corak soteriosentris SLI justru muncul dalam kontribusinya menumbuhkan perspektif inklusivisme kepada para pesertanya, yang membuat mereka tidak memandang persoalan dari satu sudut pandang saja dan mampu menerima masukan dari kelompok lain. Hal tersebut pun senantiasa dilatih dengan bekerja dalam kelompok lintas agama dan lintas fakultas guna menyusun refleksi atas materi yang baru didaftarkan. Dengan modal tersebut, para

³⁶ Semua narasumber menyebutkan bahwa para mahasiswa yang mengikuti SLI menunjukkan sikap yang lebih terbuka dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikutinya. Bapak Waryono menyebut mereka yang mengikuti SLI “mempunyai pikiran yang lebih terbuka daripada sebelumnya”. Romo Pras menyebut bahwa para alumni SLI dari USD “lebih mudah terbuka”. Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa para alumni “tidak canggung lagi untuk bergaul dan juga berbicara tentang hal-hal yang sensitif terkait isu-isu teologis antaragama ... perspektifnya sudah perspektif lintas iman”.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Waryono.

peserta diharapkan mampu menerapkan pola pikir inklusif tersebut di tempat mereka berada, sehingga usaha mewujudkan keselamatan di tengah masyarakat dapat tercapai. SLI juga telah mencoba memberi perhatian pada aksi nyata setiap tahunnya, sehingga refleksi-refleksi yang telah dibuat tidak berhenti di kalangan internal saja. Di antaranya adalah kesepakatan mengurangi penggunaan botol plastic (SLI II), penyusunan buku “Keberpihakan Lintas Iman terhadap Kaum Difabel” (SLI VI), serta video hasil refleksi yang diunggah ke YouTube (SLI X dan SLI XI).

Etika Global sebagai Dasar Keselamatan dalam SLI

Para peserta SLI sebagian besar berasal dari tiga universitas dengan basis agama di Yogyakarta, yakni UIN Sunan Kalijaga, UKDW, serta USD. Tak berhenti sampai di situ, para mahasiswa yang mengikuti pun berasal dari fakultas teologi,³⁸ sehingga paling tidak telah memiliki pengetahuan dasar mengenai iman masing-masing. Padahal, dalam pemikirannya, Knitter mengusulkan satu bentuk keselamatan yang tidak Uniknya, SLI sejak awal justru tidak mengkhususkan kegiatannya pada dialog teologis, kendati sangat memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut. Para peserta lebih diajak mengkontekstualisasikan ilmu mereka dengan mendalami satu tema khusus yang diangkat setiap tahunnya. Tema-tema inilah yang menjadi dasar para peserta untuk berdialog dalam kegiatan SLI setiap tahunnya.

Dalam pemikiran Knitter, penderitaan menjadi kata kunci dalam pembahasan mengenai etika global. Menurutnya, semua manusia memiliki pengalaman yang sama akan penderitaan. Dirinya juga mengutip pendapat Paul Tillich yang melihat penderitaan tersebut sebagai suatu *Keperihatinan Utama* (*Ultimate Concern*) yang menggerakkan semua agama³⁹. Penderitaan tersebut menurut Knitter terdiri dari setidaknya empat macam bentuk,⁴⁰ yakni penderitaan badaniah karena kemiskinan, penderitaan bumi karena penyalahgunaan, penderitaan roh karena viktimisasi, serta penderitaan karena kekerasan. Jika melihat dari sini, keempat penderitaan tersebut rupanya telah dibahas dalam SLI. Penderitaan badaniah dibahas dalam SLI I yang mengangkat tema “Filantropi dalam Agama-agama” serta SLI VI yang membahas “Kepedulian dan Keberpihakan Lintas Iman untuk Kaum Difabel”. Penderitaan bumi dibahas dalam SLI II yang mengangkat tema “Lingkungan dan Alam dan Iman”. Penderitaan roh dibahas dalam SLI III (“Membangun Spiritualitas Hidup Berbangsa”), SLI V (“Kebhinekaan, Demokrasi, dan Hak-hak Warga Negara”), dan SLI IX (“Politik Bermartabat untuk Indonesia yang Beradab”). Sedangkan penderitaan karena kekerasan dibahas dalam SLI VII (“Memahami Iman dalam Diferensiasi Identitas dan Referensi Seksual”) dan SLI VIII (“Yogyakarta City of Tolerance”). Sementara itu, SLI IV (“Kecerdasan Mendayagunakan Media dalam Mengembangkan Hidup

³⁸ Pengecualian pada UIN yang tidak memiliki Fakultas Teologi. Selama ini ada dua fakultas yang terlibat dalam SLI, yakni Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kendati demikian, dalam wawancara dengan Bapak Waryono terungkap bahwa pihak UIN sendiri tidak membatasi pada dua fakultas tersebut, sehingga seluruh mahasiswa UIN, apapun fakultasnya, dapat berpartisipasi.

³⁹ P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 85.

⁴⁰ Empat bentuk penderitaan ini disarikan dari P. F. Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*, 86-101.

Bermasyarakat Lintas Iman”), SLI IX (“Ketika Agama dan Media Menjadi Alat Politik”), dan SLI XI (“Peran Pemuda dalam Merawat Kebhinekaan dan Toleransi yang Kritis dan Konstruktif di Masyarakat”) lebih menyoroti peran dua unsur penting dalam masyarakat, yakni pemuda dan media.

Romo Joko, dalam wawancara dengan penulis, mengungkapkan bahwa persoalan sosial memang seharusnya menjadi dasar berdialog.⁴¹ Dengan demikian, pilihan para inisiator untuk menggunakan isu-isu sosial sebagai pemantik dialog pun merupakan sebuah langkah yang tepat. Hingga kini, SLI memiliki kekhasan dalam hal metode yang digunakan. Sejak awal, para inisiator telah merumuskan kurikulum khusus yang terdiri dari 60% kunjungan lapangan, 30% refleksi, dan 10% orientasi lapangan.⁴² Di sini penulis ingin menyoroti mengenai bagaimana pilihan untuk membangun dialog di atas dasar satu keprihatinan tertentu ternyata juga membutuhkan suatu kurikulum tertentu. Para peserta diajak untuk terjun langsung untuk mendengar dan mengalami berbagai bentuk penderitaan dari penuturan orang pertama, yakni para narasumber dari setiap SLI. Pada akhirnya, etika global, yang oleh Knitter disebut sebagai dasar keselamatan untuk diwujudkan, tidak hanya diperbincangkan dalam tataran akademis dalam SLI, namun benar-benar dialami secara langsung oleh para peserta.

Melengkapi pemikiran Knitter, penulis juga mengutip pendapat dari Hans Küng mengenai etika global. Jika Knitter berfokus pada penderitaan yang mempersatukan manusia, Küng dalam *Deklarasi Universal Etika Global* menyebut tuntutan fundamental etika global ini, yakni bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi⁴³. Atas dasar itu, Küng bersama dengan *Parliament of the World's Religions* menyebut empat petunjuk yang tak terbatahkan⁴⁴, yaitu 1) komitmen pada budaya non-kekerasan dan hormat kepada kehidupan, 2) komitmen kepada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, 3) komitmen pada budaya toleransi dan hidup yang tulus, dan 4) komitmen pada budaya kesejajaran hak dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Keempat petunjuk ini pun dirasakan oleh para peserta SLI. Setidaknya, dari informasi yang didapat dari tabel 1, ada 10 dari 14 responden yang mengalami adanya komitmen pada budaya non-kekerasan, solidaritas, toleransi, serta kesejajaran hak perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SLI telah mencoba menerapkan pemikiran Knitter dan Küng mengenai etika global dalam kegiatan mereka, kendati dalam perumusan definitif tidak terlalu dapat dipastikan.

Perhatian kepada Suara Korban dalam SLI

Sebagai sebuah kegiatan yang memberi konsentrasi kepada pembahasan masalah-masalah sosial, SLI juga memberi perhatian khusus kepada suara para korban. Hal ini tampak, misalnya pada pemilihan narasumber yang memberikan materi setiap tahunnya. Untuk itu, penulis mencoba

⁴¹ Wawancara dengan Romo.

⁴² Komposisi ini dipertahankan sejak SLI I hingga SLI XI.

⁴³ H. Küng, *Etik Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 16-21.

⁴⁴ H. Küng, *Etik Global*, 21-39

mendaftar narasumber-narasumber yang dihubungi oleh SLI setiap tahunnya dan menyajikannya dalam tabel 3 di bawah ini:

No	Tema SLI	Narasumber yang Dihubungi
1	Filantropi dalam Agama-agama	CD Bethesda
		Pesantren Pandanaran
		Gereja Ganjuran
		Harekrishna Hindu
		PKBI Jogja
		Matakin Solo
		Vihara Mendut
2	Lingkungan dan Alam dan Iman	Komunitas Romo Kirdjito (Merapi)
		Komunitas Industri Rakyat di Bantul
		Komunitas Mangunan di Kali Code
		Departemen Sosial
		Ganjuran dan Maguwo
		Pondok Pesantren Pabelan
		Vihara Mendut
3	Membangun Spiritualitas Hidup Berbangsa	CRCS UGM
		PSKB UGM
		Rifka Annisa WCC
		Kementerian Agama Provinsi DIY
		Vihara Mendut
4	Kecerdasan Mendayagunakan Media dalam Mengembangkan Hidup Bermasyarakat	Kantor Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penertiban Yogyakarta
		Studio Audio Visual (SAV) Puskat
		TVRI Stasiun Yogyakarta
		Radio Geronimo
		Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat
		Komisi Penyiaran Indonesia DIY
5	Kebhinekaan, Demokrasi, dan Hak-hak Warga Negara	Pusat Studi Pancasila UGM
		Komisi Pemilihan Umum DIY
		Jaringan Perempuan Yogyakarta
		Institute Development and Economic Analysis (IDEA)

		Institute for Research and Empowerment (IRE)
		Lembaga Bantuan Hukum DIY
		Lembaga Ombudsman DIY
6	Kepedulian dan Keberpihakan Lintas Iman untuk Kaum Difabel	SLB Hellen Keller
		Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
		Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS)
		Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM)
		Center for Improving Qualified Activity in Life People With Disabilities (CIQAL)
7	Memahami Iman dalam Diferensiasi Identitas dan Referensi Seksualitas	SATUNAMA
		Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY
		Pondok Pesantren Waria Al-Fatah
		People Like Us - Satu Hati (PLUSH)
		Pondok Belajar Perempuan
		American Friends Service Committee (AFSC)
8	Yogyakarta, City of Tolerance	Pemda DIY
		Polda DIY
		Aliansi Jurnalistik Independen (AJI)
		Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI)
		Kraton Ngayogyakarta
		Kantor Kementerian Agama DIY
9	Politik Bermartabat untuk Indonesia yang Beradab	FISIPOL UGM
		Kantor Komisi Pemilihan Umum DIY
		Kantor Bawaslu DIY
		DPRD DIY
		Kantor Bupati Bantul
10	Ketika Agama dan Media Menjadi Alat Politik	Bpk. Hamdi (Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
		Komisi Penyiaran Indonesia DIY
		Cyber Crime Polda DIY
		Komunitas Anti-hoax DIY
		Ahli Komunikasi Media IT dari UII

Tabel 3 Daftar Tema SLI 1-10 dan Narasumber yang Dihubungi⁴⁵

Dari data dalam tabel 3 tersebut di atas, penulis ingin menyoroti beberapa penyelenggaraan SLI yang sungguh memperhatikan suara para korban, yakni SLI II, SLI VI, dan SLI VII. Dalam tiga penyelenggaraan tersebut, SLI mengangkat tema-tema yang menjadi keprihatinan di masyarakat, yakni kerusakan lingkungan (SLI II), kaum difabel (SLI VI), serta kaum LGBT (SLI VII). SLI secara khusus memberi tempat bagi para korban dengan mengunjungi tempat-tempat di mana mereka mengalami penderitaan. Misalnya, pada SLI II para peserta diajak mengunjungi langsung komunitas Merapi, tempat di mana kerusakan lingkungan terjadi akibat penambangan pasir, atau komunitas Kali Code, tempat kaum marginal di Yogyakarta berjuang memperbaiki hidup mereka dan keluar dari jurang kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, para peserta SLI juga diajak untuk belajar dari institusi-institusi yang memiliki perhatian terhadap para korban dan berusaha membantu mereka untuk bisa bangkit dan melanjutkan hidup, seperti SLB Hellen Keller, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS), Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM), Center for Improving Qualified Activity in Life People With Disabilities (CIQAL), SATUNAMA, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, People Like Us - Satu Hati (PLUSH), Pondok Belajar Perempuan, serta American Friends Service Committee (AFSC). Dengan mengunjungi institusi-institusi tersebut, para peserta diharapkan memiliki wawasan mengenai bagaimana harus bersikap untuk membantu para difabel dan LGBT, terutama dalam memiliki tempat yang layak di masyarakat. Di sini penulis tidak ingin mengerdilkan peran SLI dalam tema-tema SLI yang lain, namun kiranya dalam tiga penyelenggaraan tersebut SLI secara khusus lebih menyapa para korban dan belajar memahami penderitaan mereka.⁴⁶

Dari sisi para peserta sendiri, 7 dari 14 responden yang memberikan tanggapan atas kuesioner melihat bahwa SLI sudah memberi perhatian pada suara para korban.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa maksud dari para fasilitator SLI yang memilih tema dan narasumber setiap tahunnya cukup dapat diterima oleh para peserta. Bagi penulis, perhatian kepada para korban yang ditunjukkan baik oleh fasilitator maupun peserta SLI ini telah memperkuat pemikiran Knitter, yang beranggapan bahwa kehadiran para korban pada akhirnya akan memaksa kita untuk tidak hanya mendengarkan, melainkan bertindak dengan dan untuk mereka. Dengan mendengarkan mereka, tujuan dialog untuk mewujudkan keselamatan pun semakin nyata melalui usaha mengurangi penderitaan para korban, bukan sekadar

⁴⁵ Data dalam tabel tersebut merupakan hasil rangkuman penulis atas pembahasan dalam Bab 2 karya tulis ini, terutama poin 2.2.3.

⁴⁶ Berbeda dari SLI II, SLI VI, dan SLI VII, tema-tema dalam SLI yang lain diangkat dari keprihatinan yang ada di masyarakat, namun tidak secara khusus mengunjungi para korban. Tema-tema seperti politik dan media tidak secara langsung “menghasilkan” korban, sedangkan dalam pembahasan mengenai toleransi, misalnya SLI VIII dan SLI X, penyelenggara SLI cenderung memilih para pemangku kebijakan sebagai narasumber.

⁴⁷ Lihat tabel 1.

berkat dalam diskusi teoretis yang mengambang. Dari sisi fasilitator, adanya perhatian pada para korban tersebut secara implisit tampak melalui perancangan program setiap tahunnya, terutama pada SLI II, SLI VI, dan SLI VII, dan pemilihan narasumber yang kompeten serta bersentuhan langsung dengan para korban, atau bahkan berasal dari kalangan para korban.

KESIMPULAN

Pemikiran Knitter mengenai dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global merupakan pemikiran yang baik dan sesuai jika diterapkan dalam konteks Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta, menjadi konteks yang tepat untuk menguji pandangan mengenai dialog korelasional. Tak hanya itu, kompleksitas masalah sosial ekonomi yang ada di Indonesia juga menjadi konteks yang ideal untuk dialog yang bertanggung jawab global. Di Indonesia, pemikiran Knitter yang cenderung masih teoretis dan umum menemukan tempatnya.

SLI, sebagai komunitas dialog interreligius yang berlokasi di Kota Yogyakarta, merupakan salah satu pihak yang mencoba menerapkan metode dialog yang khas dalam pelaksanaannya. Metode yang khas tersebut, jika dilihat secara lebih mendalam, ternyata memiliki beberapa kesesuaian dengan pemikiran Knitter. Padahal, SLI sendiri tidak pernah secara eksplisit dimaksudkan sebagai kelompok yang mendasarkan kegiatannya pada model dialog menurut Knitter. Para inisiator SLI hanya mencoba merumuskan sebuah kurikulum yang dianggap sesuai dengan peluang serta tantangan mewujudkan dialog di Indonesia dan juga latar belakang peserta sebagai calon pemuka agama. Kendati demikian, pemikiran Knitter mengenai dialog yang korelasional dan bertanggung jawab global merupakan salah satu pisau bedah yang tepat digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi di dalam SLI. Poin-poin dialog interreligius Knitter dapat cukup mudah ditemukan penerapannya dalam SLI.

Secara umum, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara realita yang ada dalam SLI dan pokok-pokok pemikiran Knitter. Hal ini bisa dimaklumi karena SLI tidak mendasarkan kegiatannya secara khusus pada pemikiran Knitter. Poin-poin persamaan antara kegiatan SLI dengan gagasan Knitter menunjukkan betapa sesungguhnya gagasan Knitter mengenai dialog tersebut universal. Tanpa mendalami secara khusus pemikirannya, SLI telah melaksanakan poin-poin dialog Knitter melalui kurikulum yang telah berjalan selama sepuluh tahun. Di sisi lain, beberapa hal yang berbeda justru melengkapi gagasan Knitter yang sebelumnya masih cenderung teoretis. Di sini penulis secara khusus menyebut proses *udar prasangka* dan inkulturasi dengan budaya setempat sebagai dua poin yang menjadi pembeda sekaligus pelengkap gagasan Knitter. Melalui dua poin tersebut, gagasan Knitter dapat lebih membumi dan mudah dijangkau, terutama bagi mereka yang tidak secara khusus mendalami pemikirannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Clark, F. X. *Gereja Katolik di Asia: Sebuah Pengantar*. Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Jansen, 2001.

Grundmann, Christoffer. H. *Interreligious Dialogue: An Anthology of Voices Bridging Cultural and Religious Divides*, Minnesota: Anselm Academic, 2015.

Knitter, Paul F. *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggungjawab Global*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

Küng, Hans. *Etik Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

DEFORESTASI VS REBOISASI HUTAN DI INDONESIA

(Dalam Terang Ensiklik *Laudato Si'*)

Gregorius Rivaldo Junior

STFT Widya Sasana Malang

Matias Hendra Tenis

STFT Widya Sasana Malang

FX. Armada Riyanto

STFT Widya Sasana Malang, Email: bambangmantap54@gmail.com

ABSTRAK

Fokus tulisan ini adalah mengangkat masalah pengrusakan hutan yang terjadi terus menerus di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pandang Gereja Katolik tentang hutan. Metodologi yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Banyak pihak yang telah mengupayakan berbagai macam cara untuk mengatasi permasalahan ini. Namun semua cara tersebut hanya menemui jalan buntu tanpa ada solusi yang berarti. Kebuntuan tersebut terjadi karena ulah manusia sendiri. Kebutuhan manusia yang semakin tidak terkendali ternyata memberikan dampak yang buruk bagi hutan. Ribuan bahkan jutaan hektar hutan menjadi korban dari kerakusan manusia. Tindakan yang mengatasnamakan kelestarian hutan menjadi kedok bagi individu maupun kelompok untuk merusak hutan. Manusia harus menyadari akan dampak kerusakan hutan di kehidupan mendatang. Dengan kata lain, manusia harus siap untuk menghadapi berbagai krisis dan bencana alam. Gereja Katolik dalam *Laudato Si'* juga menyerukan seruan yang sama yaitu masalah pengrusakan alam, khususnya hutan. Pandangan Gereja Katolik yang memandang hutan sebagai saudara membuat manusia harus mengubah citra dan cara pandang terhadap hutan. Hutan bukanlah objek yang bisa dieksploitasi secara berlebihan oleh manusia. Hutan adalah paru-paru bumi yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Relasi hutan dan manusia menggambarkan suatu harmoni kehidupan yang indah dan dinamis.

Kata Kunci: *Hutan, Laudato Si', Manusia, Kerusakan.*

PENDAHULUAN

Hutan adalah paru-paru bagi bumi. Layaknya tugas paru-paru dalam tubuh manusia, hutan bertugas menyalurkan oksigen kepada setiap makhluk hidup. Keberadaan hutan sebagai penyedia oksigen terbesar di bumi menjadikannya sebagai suatu ekosistem yang sangat esensial. Semua makhluk hidup menjadikan hutan sebagai wadah untuk bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya digunakan sebagai tempat bereproduksi, hutan juga menjadi penyedia kebutuhan yang substansial bagi manusia. Hubungan timbal balik yang menguntungkan bagi makhluk hidup ternyata memberikan dampak besar bagi keberlangsungan makhluk hidup. Selama berabad-abad manusia menggantungkan diri pada sumber daya yang berasal dari hutan. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Dassir mengenai hubungan masyarakat lokal dengan ekosistem hutan pada komunitas Ammatoa di Kajang, Sulawesi Selatan menjadi penegas

dari hubungan tersebut. Temuan dari penelitian tersebut adalah komunitas Ammatoa memandang hutan sebagai sumber kehidupan dan penyangga keseimbangan lingkungan.¹

Potensi hutan yang begitu berlimpah, khususnya di Indonesia, ternyata menjadi godaan bagi manusia. Kerakusan manusia untuk terus mengeksploitasi hutan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, laju kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 3 juta ha per tahun. Angka tersebut adalah sebuah peringatan bagi masyarakat Indonesia. Hamparan hutan yang terus menerus mengalami penurunan setiap tahun menjadi alarm bahaya bagi keberlangsungan ekosistem. Hutan memegang peranan yang penting dalam ekosistem, antara lain; ekologis, hidrologis, biologis-genetis, pedalogis-edafologis, dan klimatologis.² Apabila kelima fungsi hutan ini tidak bisa berjalan dengan baik, planet bumi beserta dengan kehidupan di dalamnya akan memasuki fase kepunahan.

Manusia harus menanggapi kerusakan dengan segera. Deforestasi yang dilakukan secara terus menerus harus segera dihilangkan. Kesadaran akan krisis lingkungan hidup perlu dikobarkan sehingga semangat kebersatuan dengan alam tetap terjaga. Dengan kata lain, hutan adalah sesama bagi manusia. Armada Riyanto mengatakan bahwa penderitaan sesama adalah penderitaan yang juga harus ditanggung bersama.³ Ketika sesama menderita, rasa solidaritas untuk hadir bersamanya pun juga sendirinya akan muncul. Manusia harus hidup berdampingan dengan hutan dan makhluk hidup lainnya.

Permasalahan yang hendak diangkat penulis dalam tulisan ini adalah degradasi hutan atau deforestasi dan dampaknya bagi lingkungan. Kebiasaan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya ternyata berdampak buruk bagi hutan. Penebangan hutan demi membuka lahan baru menjadi permasalahan yang harus segera dipecahkan. Banyak pihak telah mengupayakan berbagai macam cara demi mencegah permasalahan ini semakin parah. Gereja juga ikut menyuarakan suaranya akan permasalahan ini dengan menerbitkan dokumen *Laudato Si'*. Tujuan dari tulisan ini adalah memaknai pentingnya menjaga kelestarian hutan dalam terang *Laudato Si'*. Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan

¹ Muhammad Dassir, "Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang," *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 3, no. 2 (Agustus 2008), 135.

² A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 28.

³ Armada Riyanto, *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 313.

PEMBAHASAN

Permasalahan Pengrusakan Hutan di Indonesia

Kelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama. Rusaknya hutan otomatis juga menjadi tanggung bersama. Namun manusia telah dibutakan pada penyakit yang dinamakan kerakusan. Pemikiran rasional telah mengikat manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Bencana alam yang terjadi di berbagai daerah Indonesia menjadi faktor pemicunya. Banjir bandang yang terjadi akhir-akhir ini di Batu, Malang, Jawa Timur menjadi contoh nyata dari pengrusakan hutan.⁴ Berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai membuat ekosistem alam menjadi tidak seimbang. Desakan masyarakat untuk mengalihfungsikan hutan menjadi daerah pemukiman memang tidak bisa dihindari. Jalan satu-satunya untuk memenuhi desakan tersebut adalah dengan menebas hutan yang adalah daerah resapan air. Hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air menimbulkan dampak yang tidak main-main. Harga yang harus dibayar atas kerusakan tersebut begitu besar.

Konflik kepentingan yang terjadi dalam relasi manusia bisa menjadi salah satu faktor pemicu yang utama. Manusia membutuhkan lahan tinggal karena adanya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dari tahun ke tahun. Untuk membangun sebuah lahan tinggal bagi manusia dibutuhkan suatu lahan luas. Lahan luas tersebut tersedia secara gratis di hutan-hutan Indonesia. Hutan menjadi korban dari kepentingan dalam memenuhi segala kebutuhannya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Meskipun memiliki hutan hujan tropis terbesar, kerusakan hutan tidak bisa dihindarkan. Mengacu data yang dikeluarkan World Bank, kerusakan atau deforestasi terhadap hutan mencapai angka 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun. Namun data yang dikeluarkan World Bank masih belum menyentuh angka yang sebenarnya. Greenpeace mencatat bahwa deforestasi hutan di Indonesia pernah menyentuh angka tertingginya yaitu 3.800.000 ha per tahun.⁵

Angka kerusakan hutan di Indonesia yang begitu tinggi tentunya dilandaskan pada faktor penyebab kerusakan itu sendiri. Terdapat beberapa faktor penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia.⁶

⁴ Ellyvon Pranita, "Banjir Bandang di Batu, Begini Analisis BMKG," <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/06/100100223/banjir-bandang-di-batu-malang-begini-analisis-bmkg?page=all>, diakses 12 Desember 2021.

⁵ Harisuddin, "International Day of Forests 2021," <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>, diakses 12 Desember 2021.

⁶ A. Sonny Keraf, Ibid, 79-111.

- Kesalahan cara pandang dan perilaku. Anggapan manusia sebagai pusat dari alam semesta dan makhluk pilihan Allah yang ditugaskan untuk menguasai bumi telah melahirkan suatu sikap buruk. Manusia menjadi makhluk eksploitatif atau kasarannya bisa dibilang seperti binatang yang memperebutkan status dan kekuasaan.⁷
- Paradigma dan kebijakan pembangunan. Pembangunan sebuah bangsa yang maju harus didasarkan pada kebijakan ekonomi yang kuat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus menjadi sasaran utama tanpa harus memperhatikan aspek pembangunan yang lain.
- Modernisasi. Kesadaran manusia akan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang memberikan kesempatan untuk semakin menajamkan akal budinya. Dampak yang ditimbulkan pun sangat merugikan hutan karena ditemukannya teknologi modern yang bisa memperparah kerusakan pada hutan.
- Buruknya tata kelola pemerintahan. Peraturan yang telah dibuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sering kali dilanggar. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam pemerintahan membawa dampak yang buruk bagi kelestarian hutan. Pemerintah tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam mengawasi dugaan pelanggaran pengrusakan hutan di Indonesia.
- Desentralisasi dan Liberalisasi Politik. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seringkali mengorbankan aspek kepedulian terhadap lingkungan hidup. Hutan sering menjadi korban dari ketidakpedulian tersebut. Kegiatan liberalisasi politik memberikan mimpi buruk bagi lingkungan hidup. Kampanye untuk menjadi calon kepala daerah ternyata membutuhkan uang yang banyak. Sponsor dari luar menjadi sumber dana utaman dalam kampanye. Sebagai balas budi karena menang, kepala daerah yang disponsori mengizinkan perusahaan ilegal untuk mengeksploitasi sumber daya alam daerah tersebut. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan memicu bencana alam di masa depan.
- Lemahnya komitmen bersama. Komitmen untuk menjaga kelestarian hutan menjadi hal yang substansial. Hutan adalah harta paling berharga bagi kehidupan di bumi. Namun komitmen seringkali dilanggar, hasrat untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok menjadi lebih penting daripada kelestarian hutan. Sekali lagi, hutan menjadi korban keganasan dan kerakusan manusia.
- Lemahnya penegakan hukum. Sistem hukum di Indonesia masih belum mendekati sempurna. Perusahaan dari dalam maupun luar negeri sering memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pengrusakan terhadap hutan. Penebangan dan pembalakan liar terjadi dimana-mana. Tidak jarang juga aparat hukum terlibat dalam tindakan tersebut demi memuaskan kepentingan pribadi. Hukum dilanggar untuk memuaskan kepentingan sesaat.

⁷ Yuval Noah Harari, *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2014), 49.

Usaha untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia masih harus menempuh jalan yang panjang. Kesadaran untuk menjaga hutan dari semua pihak menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Hubungan hutan dan manusia pada dasarnya adalah kebersatuan. Kebersatuan yang menghasilkan suatu relasi dinamis yang memungkinkan suatu perubahan secara terus menerus. Pemahaman terinspirasi dari pemikiran seorang filsuf Yunani, Heraklitos. Ia memahami bahwa segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini akan mengalami perubahan.⁸ Armada Riyanto mengatakan bahwa untuk memahami alam membutuhkan kesadaran dari semua pihak, Alam adalah sebuah dinamika kesempurnaan hidup yang indah dari seorang manusia.⁹ Kesempurnaan tersebut terpapar dalam relasi dinamis antara alam dan manusia. Dengan kata lain, manusia dan alam adalah dua subjek yang bertugas untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Hutan di Indonesia adalah dinamika kesempurnaan yang menggambarkan keindahan dari hidup seorang manusia Indonesia. Keindahan tersebut perlu dijaga agar alam yang sudah diberikan secara gratis ini terus menjadi penopang kehidupan bagi manusia.

Melestarikan Hutan di Indonesia

Tindakan pengrusakan hutan yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Ribuan bahkan jutaan orang di Indonesia merasakan penderitaan. Kehilangan harta benda bahkan nyawa adalah hal biasa. Segenap masyarakat perlu menyadari pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan. Diperlukan tindakan nyata untuk melestarikannya. Dalam Kitab Kejadian, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bertumbuh dan berkembang.¹⁰ Perintah Allah harus dipahami sebagai tugas bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam. Upaya reboisasi hutan akibat pembalakan liar memang terus dilakukan. Namun tidak semua pihak melakukannya. Upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia tidak akan tercapai, apabila yang melakukannya hanya segelintir orang saja.

Semua pihak harus mengambil bagian dalam upaya tersebut. Manusia membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk bisa berkembang sebagai seorang manusia penuh.¹¹ Maksud dari pemahaman ini adalah manusia tidak bisa menanggung tugas menjaga kelestarian hutan seorang diri. Manusia harus bekerja sama dan mengesampingkan ego masing-masing demi tujuan mulia ini. Dengan segala kemampuan yang ada, manusia seharusnya bisa untuk memenuhi tugas tersebut. Untuk itu, manusia perlu melakukan beberapa hal yang mungkin bisa menumbuhkan kesadaran akan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan.¹²

⁸ A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 78.

⁹ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 28.

¹⁰ Lih. Kej 1:28.

¹¹ A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, *ibid*, 92.

¹² A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, *ibid*, 115-161.

- Perubahan cara pandang dan perilaku. Manusia perlu memandang alam sebagai kesatuan dengan dirinya. Filsafat Jawa memahami alam sebagai manunggaling makrokosmos dan mikrokosmos. Maksudnya adalah kesatuan manusia dengan alam pada akhirnya akan membawa manusia pada kesatuan dengan Yang Ilahi.¹³ Manusia harus mengubah cara pandang antroposentris yang mengutamakan kepentingan manusia menjadi biosentris dan ekosentris yang memandang hutan sebagai bagian berharga dalam dirinya.
- Perubahan paradigma dan kebijakan pembangunan. Sebuah KTT di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 menghasilkan suatu kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini adalah bentuk dari kesadaran manusia akan dampak buruk dari krisis lingkungan. Namun tindakan nyata dari kesepakatan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Masih pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kepentingan alam atau hutan pada hal ini. Diperlukan suatu tindakan radikal dalam bertindak menjaga kelestarian hutan.
- Beralih ke industri bersih. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang seharusnya memberikan dampak yang positif bagi manusia. Manusia memasuki tahap modernitas dalam hidup yang memungkinkannya untuk mengupayakan segala hal. Salah satunya adalah dengan menciptakan teknologi industri yang ramah lingkungan. Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kelestarian hutan. Usaha melestarikan akan menjadi sia-sia, apabila pembangunan teknologi tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup sekitar.
- Tata kelola lingkungan hidup yang baik. Pemerintahan yang berlandaskan pada tata kelola lingkungan hidup yang baik menjadi perhatian utama dalam hal ini. Kebijakan pemerintah untuk mengelola pembangunan memang sangat diperlukan demi mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik. Namun akan lebih baik, apabila tata kelola pemerintahan diselaraskan dengan tata kelola lingkungan hidup yang baik pula.
- Penguatan dan pelurusan desentralisasi. Sumber daya alam yang terdapat di daerah kiranya perlu diperhatikan. Sistem desentralisasi tentang tata kelola lingkungan hidup kiranya perlu diperjelas sehingga pemerintah daerah tidak terpancing untuk mengundang investor asing atau perusahaan masuk ke daerahnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- Aksi nyata. Tindakan nyata menjadi inti dari seluruh upaya-upaya tersebut. Tanpa adanya tindakan nyata, segala sesuatunya yang sudah tersusun akan menjadi sia-sia. Meskipun hanya berupa tindakan sederhana dalam menjaga kelestarian lingkungan, hal tersebut tetap memberikan dampak yang baik bagi lingkungan, terkhususnya adalah hutan.

¹³ A. Sonny Keraf, Filsafat Lingkungan Hidup: Sebagai sebuah Sistem Kehidupan, ibid, 93.

Segala usaha yang telah dijabarkan di atas telah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang peduli dengan sekitarnya. Masih banyak orang yang mau meluangkan waktunya untuk melakukan hal sederhana seperti ini. Orang Jawa menganggap alam sebagai ibu. Ibu yang setia menjaga anaknya dan memberikan makanan serta minuman secara cuma-cuma. Anggapan ini memiliki relevansi yang begitu penting berkaitan dengan hutan.¹⁴ Hutan adalah subjek yang dinamis tidak pernah berhenti memproduksi sesuatu bagi kebutuhan manusia. Keindahan hutan akan terus memancarkan sebuah karya Allah yang begitu indah bagi manusia.

PANDANGAN DAN KONTRIBUSI *LAUDATO SI'* TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

Ensiklik *Laudato Si'*

Laudato Si' merupakan ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 18 Juni 2015. Ensiklik ini berisi permenungan dan seruan-seruan tentang perawatan bumi sebagai rumah dan milik bersama. Ensiklik ini lahir dari keprihatinan paus Fransiskus atas situasi bumi dan dunia ciptaan Allah saat ini.¹⁵ Yang melatar belakangi lahirnya Ensiklik *Laudato Si'* ialah karena secara realitas dalam kehidupan manusia, manusia telah merusak dan melukai lingkungan hidupnya dan manusia juga telah merusak relasinya dengan manusia yang lain, terutama bagi mereka yang miskin dan mereka yang akan hidup pada generasi mendatang (bdk. LS. 2)

***Laudato Si'* dan Lingkungan Hidup**

Dewasa ini, banyak sekali kasus-kasus sosial yang sering terjadi dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu kasus yang sering menjadi perbincangan hangat dan fenomenal bahkan menjadi trending topik dalam media sosial yaitu persoalan lingkungan hidup. Banyak pihak yang berusaha mencari solusi yang terbaik dalam menangani masalah sosial ini. Salah satu pihak yang berperan penting dalam melihat masalah ini harus diselesaikan yaitu dari pihak Gereja sendiri. Banyak dokumen, ensiklik dan artikel yang dikeluarkan oleh Gereja dengan tujuan mengingatkan kembali masyarakat umum tentang seruan St. Fransiskus dari Asisi mengenai eksistensi bumi dan alamnya sebagai rumah bersama.

Paus Fransiskus menyatakan bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sebagai satu tanda kecil dari krisis etika, budaya dan spiritual modernitas. Dan untuk

¹⁴ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, ibid, 38.

¹⁵ Keseluruhan Uraian ini disarikan dari Paus Fransiskus, *Ensiklik *Laudato Si'*: Terpujilah Engkau*. Penerj. Martin Harun (Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI, 2016), hlm. 1-8.

mengatasinya yaitu dengan pengorbanan dan “revolusi budaya” di seluruh dunia.¹⁶ Bukanlah suatu perkara mudah, karena harus mengandalkan banyak pihak yang memiliki kesadaran tinggi untuk mengimplementasikan pesan-pesan paus Fransiskus soal “revolusi budaya”. Paus Fransiskus sendiri menunjukkan kekagumannya dan kehormatannya terhadap unsur-unsur alam ciptaan yang ia anggap sebagai saudara-saudari baginya. Thomas Bery, seorang teolog ekologi mencermati, suatu sikap menghancurkan bumi sama dengan menghancurkan dasar imajinasi religius yang sama mengakibatkan semacam “kelaparan jiwa”, sebab hampir semua gambaran religius pokok justru berasal dari lingkungan hidup.¹⁷

Perkembangan kebudayaan manusia menjadi keprihatinan dari kacamata Gereja pula. *Laudato Si'* memberikan arahan bagi masyarakat dan umat Kristiani kontribusi dalam melestarikan alam. Alam dilihat sebagai sahabat yang nantinya menjadi kesatuan ruang dengan segala jenis objek yang mempengaruhi dan membentuk kesatuan utuh dalam tatanan unsur lingkungan hidup. Melihat perkembangan zaman teknologi yang cepat dan dinamis, membutuhkan mayoritas orang lupa akan pelestarian alam. Banyak orang yang hanya menaruh perhatian pada inovasi-inovasi baru sehingga menyampingkan aspek-aspek kelestarian alam.

Masalah-masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat sosial banyak mengakibatkan aspek-aspek lain juga tergusur dan bahkan menghilang dari muka bumi. Salah satunya yaitu masalah lingkungan hidup. Bumi yang hijau dan indah menjadi rusak akibat perbuatan manusia yang lupa akan martabatnya bahwa hakikatnya ia akan kembali pada alam dan Tuhan. Iman Gereja melihat fenomena ini harus diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan aspek dan pihak lain. Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik “*Laudato Si'*” dalam memerankan peranannya dalam menangani masalah ini. Kontribusi sangat kontekstual dengan realitas masalah sosial terkhusus masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh sekian banyak pihak. Baik itu Gereja, masyarakat umum dan bahkan pemerintah.

Seruan Paus Fransiskus Tentang Krisis Ekologi

Krisis ekologi yang terjadi di bumi dan alam ciptaan Allah saat ini, menjadi refleksi bagi paus Fransiskus dalam menghayati panggilan untuk pertobatan batin. Dalam realitasnya masih banyak orang yang masih kurang menyadari dan bahkan cenderung meremehkan soal ungkapan kepedulian terhadap lingkungan. Begitu banyak alasan realisme dan pragmatisme yang menghambat dan membutuhkan orang

¹⁶ “*Laudato Si'*”, Ensiklik Paus Fransiskus tentang Lingkungan Hidup - Flores.co, diakses pada tanggal 8 Desember 2021.

¹⁷ Thomas Bery, *The Dream of the Earth* (San Francisco: Sierra Club Books, 1988). Hal. 218.

untuk melihat keadaan alam yang sudah rusak dan hancur. Berhubungan dengan refleksi paus Fransiskus, dunia saat ini membutuhkan orang-orang muda yang mampu berkembang dengan dunia di sekitar mereka sehingga kelestarian ekologi tetap utuh dan terjaga.

Bagi paus Fransiskus, menghayati panggilan untuk melindungi karya Allah adalah bagian penting dari kehidupan yang saleh; dan bukan sebuah opsi atau aspek sekunder dalam pengalaman kristiani (LS. 217). Dalam *Laudato Si'* sendiri ada beberapa poin penting dalam melihat seruan-seruan paus Fransiskus yaitu: Menuju gaya hidup baru, pendidikan untuk perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup, pertobatan ekologis, kegembiraan dan damai, cinta dalam bidang sipil dan politik, tanda-tanda sakramental dan istirahat yang dirayakan, Allah Tritunggal dan hubungan antara makhluk, ratu seluruh dunia ciptaan, dan melampaui matahari.¹⁸

Allah menciptakan setiap unsur di bumi ini baik manusia dan segala makhluk ciptaan lainnya dengan kasih-Nya (Bdk. Kej 1). Dalam hal ini, martabat manusia yang adalah makhluk yang berakal budi berperan sebagai rekan kerja Allah harus menata, menjaga, memelihara dan mengembangkan seluruh ciptaan di dunia ini. Solidaritas dan kepedulian Allah terhadap esensi manusia dalam proses penciptaan-Nya menjadi pegangan manusia untuk terus memperlakukan hal yang sama kepada ciptaan lainnya secara baik dan bijak. Sebagai orang Kristen pun harus melihat lebih dalam arti dari penciptaan itu sehingga segala objek dan unsur yang ada di bumi boleh merasakan perlakuan dan tindakan yang sama seperti martabat manusia yang luhur sebab manusia dan alam bahkan unsur-unsur lainnya akan saling bergantung tanpa mengurangi esensi dari setiap elemennya.

Tugas dan Relevansi Bagi Gereja dan Masyarakat

Dalam realitas kehidupan manusia dengan pelbagai fenomena alam yang terjadi saat ini mengakibatkan banyak kerusakan di setiap tempat. Ada banyak alasan yang menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu karena terciptanya sikap antroposentrisme. Dalam antroposentrisme manusia tidak mengakui nilai tertinggi dari eksistensi makhluk lain.¹⁹ Juga dapat disamakan sikap antroposentrisme dengan sikap egoisme (dirinya sendiri). Dalam hal relasi, sikap ini tidak memandang paham kesetaraan dan kesamaan dengan alam sehingga relasi alam dan manusia hanya sebatas subjek dan objek. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan paradigma yang salah bahwa alam hanya menjadi objek pemuas bagi kebutuhan manusia.

¹⁸ *Ensiklik Laudato Si'*: *Terpujilah Engkau*. Penerj. Martin Harun (Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI, 2016), hlm. 125-149.

¹⁹ A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 41.

Manusia sebagai makhluk yang paling luhur harusnya memandang alam sebagai dinamika kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Alam seakan menjadi rujukan bagi ritme hidup sehari-hari. Alam juga seolah menata bagaimana manusia mesti menjalani aktivitasnya. Alam lantas menjadi “hukum” kehidupan.²⁰ Cara pandang yang salah terhadap relasi manusia dengan alam menjadi akibat rusaknya relasi manusia dengan alam sehingga seringkali terjadi keserakahan, kerusakan, penderitaan dan akhirnya sikap saling menyalahkan.²¹ Kerusakan lingkungan hidup pun menjadi fokus utama dalam kehidupan menggereja dan kehidupan bermasyarakat sosial. Lingkungan yang bersih akan sangat membantu bagi perkembangan gereja dalam tugas pelayanan misi kerajaan Allah dan memudahkan mobilitas manusia.

Melihat situasi dunia saat ini, Gereja tidak tinggal diam dalam memberikan kolaborasi untuk menangani masalah dunia ini. Tujuannya ialah meningkatkan kepedulian terhadap melestarikan keutuhan alam ciptaan. Gereja tidak bekerja sendiri tetapi justru melibatkan semua orang yang berkehendak baik untuk memberikan kontribusinya dalam menjaga, memelihara dan melestarikan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, Gereja menjadi pusat pembelajaran yang transformatif dalam membawa perubahan dan sebagai agen untuk membaharui kehidupan jemaat sesuai dengan kehendak Allah. Pendidikan Kristiani yang dilakukan oleh gereja harus berorientasi dan dievaluasi berdasarkan terang injil Kerajaan Allah (Schipani: 1997). Sehingga kepedulian gereja terhadap masalah lingkungan akan sangat mengurangi dampak-dampak sosial lainnya seperti; kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, pengasingan, penindasan, rasisme, ketidakadilan dan masih banyak faktor-faktor sosial yang akan terjadi jika masalah-masalah lingkungan hidup terus terjadi dan tidak mendapatkan perhatian khusus.

Pendidikan kristiani yang dikontrusikan oleh gereja harus berangkat dari transformasi sosial yang menggambarkan keaktifan dalam terang pemerintah Allah sebagai warga Negara yang baik dan kasih, berani dan peduli pada lingkungan sekitar. Karena keberadaan manusia sangat bergantung pada lingkungan hidup sekitar. Gereja memberikan pelayanan pastoral dalam bidang dan ilmu tentang lingkungan hidup sehingga mayoritas dari penyebab kerusakan lingkungan menyadari makna tentang pemeliharaan lingkungan hidup dan alam. Karena pada hakekatnya manusia akan saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan hidup dan sebaliknya.

Konstruksi dari masyarakat umum pun sangat dibutuhkan dalam memberikan pengarahannya untuk terus memelihara dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Partisipasi masyarakat secara efektif akan dapat melampaui kemampuan orang-perorangan, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat

²⁰ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai-Berfilsafat Teologi Sehari-hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm.29.

²¹ M. Hendrika, “Panggilan Berhari Ibu Bagi Manusia: Kajian Ekofeminis,” dalam A. Sunarko dan A. Eddy Kristiyanto (ed.), *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Illahi, Tinjauan Teologis atas Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 103.

diperlukan, terutama bergerak di bidang lingkungan.²² Aspirasi masyarakat dapat berbagai bentuk seperti pengawasan soal mekanisme atau prosedur administrasi perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan. Tugas-tugas ini tentu tidak dikerjakan sendiri melainkan secara kolaborasi bekerja sama demi menuju lingkungan hidup yang bersih, aman dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Namun, tidak jarang partisipasi ini terhalang akibat moral masyarakat, budaya masyarakat, pendidikan masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat, tingkat penguasaan teknologi. Tentu dari setiap aspek ini akan mengganggu eksploitasi dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga pemerintah terus meningkatkan kepedulian, kemandirian, ketanggasegeraan, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local sehingga tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup.

Relevansi dalam realitas kehidupan di era teknologi ini dapat dilihat bahwa masih ada begitu banyak pihak yang memanfaatkan sumber daya alam atau tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya dengan membuang sampah dan lain sebagainya. Akibatnya terjadi alam pun marah dengan fenomena dunia yang tak bisa dibendung seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan masih banyak lagi. Hal ini tentu merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, masyarakat, gereja dan pemerintah harus terus membenahi diri dengan melihat lingkungan hidup sebagai salah satu bagian dari pola pikir dan kehidupan manusia itu sendiri sehingga keseimbangan kelestarian alam tetap terjaga dan aman.

KESIMPULAN

Hutan adalah bagian dari kehidupan manusia. Melalui hutan, manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dalam dokumen *Laudato Si'* disebutkan bahwa lingkungan hidup, khususnya hutan adalah saudara dan saudari bagi manusia. Hubungan saudara ini menunjukkan adanya relasi yang begitu mendalam antara hutan dan manusia. Ketika hutan menderita karena dirusak, sikap yang diambil oleh manusia seharusnya adalah iba dan memberikan perhatian. Namun realita tidak menunjukkan sebenarnya, manusia justru bersikap rakus untuk dengan mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Tindakan manusia dalam mengeksploitasi hutan semakin menjadi-jadi dengan adanya dukungan dari perkembangan teknologi.

Paus Fransiskus menilai sebagai penyakit yang harus disingkirkan. Kepedulian terhadap hutan harus semakin ditingkatkan. Manusia tidak bisa egois mengambil segalanya hanya untuk memenuhi kepentingannya. Apabila hal ini dilakukan secara terus menerus, dampak yang ditimbulkan tidak secara

²² Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 97.

langsung dirasakan melainkan akan dialami di masa depan. Untuk itu manusia perlu menyadari bahwa hutan adalah paru-paru bumi yang memegang keseimbangan alam di bumi ini. Ketika hutan rusak, maka bencana alam akan terus mengintai kehidupan manusia. Bahkan memberikan dampak kehancuran yang cukup parah. Oleh karena itu tugas untuk memelihara alam bukan hanya diperuntukan bagi seseorang tetapi bagi semua pihak seperti masyarakat umum, pemerintah maupun gereja sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyanto, Armada. *Menjadi Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- _____. *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Keraf, A. Sonny. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- _____. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- _____. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si''''*. Penterj. Martin Harun. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hendrika, M. "Panggilan Berhari Ibu Bagi Manusia: Kajian Ekofeminis." Dalam *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Illahi: Tinjauan Teologis atas Lingkungan Hidup*, diedit oleh A. Sunarko dan A. Eddy Kristiyanto, 103. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Bery, Thomas. *The Dream of the Earth*. San Fransisco: Sierra Club Books, 1988.
- Dassir, Muhammad. "Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang." *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 3, no. 2 (Agustus 2008): 135.
- Pranita, Ellyvon. "Banjir Bandang di Batu, Begini Analisis BMKG." <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/06/100100223/banjir-bandang-di-batu-malang-begini-analisis-bmkg?page=all>, diakses 12 Desember 2021.
- Harisuddin, "International Day of Forests 2021." <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>, diakses 12 Desember 2021.
- "Laudato Si''''", Ensiklik Paus Fransiskus tentang Lingkungan Hidup - Floresa.co, diakses pada 8 Desember 2021.

MARAKNYA PERDAGANGAN MANUSIA DALAM TERANG AJARAN SOSIAL GEREJA (*EVANGELIUM VITAE*) DAN HAM

Paskalis Rivaldo Ghari,

Paulinus Siringoringo

Henriques Changestu William Guru

STFT Widya Sasana. Email: sabon.william@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini meletakkan fokus pada tema perdagangan manusia menurut Ajaran Sosial Gereja (*Evangelium Vitae*) dan HAM. Metode yang diterapkan ialah analisis kepustakaan dan juga dilihat dari sebuah contoh yang nyata atas perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Melalui kasus dan analisis kepustakaan penulis melihat bahwa perdagangan manusia telah melanggar hukum alam yang telah diciptakan oleh Allah. Menurut HAM perdagangan itu melanggar aturan hidup manusia karena tidak memberi kebebasan untuk hidup kepada manusia. Tujuan penulisan ini supaya terlihat dengan jelas bagaimana pandangan Gereja dan HAM mengenai perdagangan manusia sehingga manusia semakin sadar atas pelanggaran yang telah dilakukan selama ini. Perdagangan manusia telah melanggar atau merusak ciptaan Allah yang sempurna. Manusia memiliki hak untuk hidup bebas. Studi analisis kepustakaan ini sampai pada temuan bahwa Gereja dan HAM memandang perdagangan manusia merupakan sebuah perbuatan jahat. Tindakan perdagangan manusia merusak keberadaan manusia itu sebagai manusia karena haknya telah diambil sebagian oleh mereka yang melakukan tindakan perdagangan manusia.

Kata Kunci: *Perdagangan Manusia, HAM, Hak, Ajaran Sosial Gereja*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi masalah yang baru saja muncul di tengah maraknya ketidakadilan pada manusia pada saat ini. Perdagangan manusia bukan sebuah cerita mitos tetapi benar-benar terjadi. Peristiwa itu membuat kecemasan dan kekecewaan kepada pemerintah karena belum menemukan pola yang tepat untuk memberantas perdagangan manusia. Perdagangan manusia bukan dilihat dari satu sisi yaitu penjualan manusia untuk dikirim ke luar negeri sebagai pekerja seks komersial. Perdagangan manusia berarti segala transaksi jual beli terhadap manusia. Eksploitasi perdagangan manusia meliputi pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

PBB berjuang untuk memerangi perdagangan manusia. Perdagangan manusia secara tidak langsung menurunkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Untuk meningkatkan kesadaran akan berbahayanya perdagangan manusia, setiap 2 Desember menjadi hari internasional mengenai penghapusan perdagangan manusia. Peringatan ini dilakukan untuk menyadarkan manusia bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan secitra dengan-Nya. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban mengenai hidupnya. ILO mencatat 40 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern. Perbudakan

modern melingkupi praktik-praktik seperti kerja paksa, jeratan hutang, kawin paksa, dan perdagangan manusia. Hal itu terjadi karena adanya unsur ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹

Persoalan Perdagangan Manusia

Seperti yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perdagangan manusia adalah kejahatan terbesar ke tiga dan menjadi salah satu industri kejahatan paling menguntungkan di dunia (diperkirakan keuntungan melebihi 150 miliar dollar per tahun), karena berkorelasi erat dengan pencucian uang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba ilegal.² Perdagangan manusia menjadi tindakan kejahatan. Itu berarti tindakan perdagangan manusia menjadi sebuah peristiwa yang harus serius ditindaklanjuti. Perdagangan manusia bisa berarti perbudakan manusia pada zaman modern saat ini.

Perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa suatu bentuk perbudakan modern. Pengertian yang lebih komprehensif dikatakan bahwa perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman.³ Manusia bagian penting pada penciptaan. Manusia memiliki tempat yang pertama dalam pilihan untuk menguasai dan memelihara ciptaan. Sehingga tidak heran kalau manusia diperjualbelikan itu berarti menurunkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

Karena “aku mengada” (sum) oleh rasio atau akal budinya, filsafat Descartes berangkat pertamanya dari kesadaran (cogito). Kesadaran inilah yang memungkinkan Manusia disebut “subjek”. Dan, karena setiap manusia adalah Manusia dengan akal budinya, maka relaitas “subjek” bukan karakter manusia, melainkan mengada dari manusia. Jadi subjektivitas identik dengan being manusia.⁴ Manusia begitu berharga. Manusia memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal budi yang memberikan perbedaan yang signifikan dalam seluruh ciptaan manusia.

Manusia memiliki martabat yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Dalam Kitan Kejadian dijelaskan bagaimana manusia diciptakan sebagai yang paling tinggi atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Selain Kitab Suci yang kerap menjadi rujukan asal usul martabat manusia, juga terjadi peristiwa luar biasa, seperti revolusi Prancis. Revolusi Prancis kerap disebut sebagai asal usul penghormatan

¹ Rhany Chairunissa Rufinaldo (2020, Desember 02), “ILO: 40 juta orang jadi korban perbudakan modern” AA, diakses pada 10 Desember 2021 melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/ilo-40-juta-orang-jadi-korban-perbudakan-modern/2063064>.

² Ilhamul Azis Osmond, “Peran Internasional Organization for migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2015-2018” (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019), 2. Diakses pada 10 Desember 2021 melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perdagangan+sejaeah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_fvezOK7YdYJ.

³ Manintiro Uling, “Tinjauan Manusia sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking di Indonesia,” Jurnal TE DEUM No.9 Vol. 2 (2020). Diakses pada 10 Desember 2021 melalui https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=ajaran+sosial+gereja+mengenai+perdagangan+manusia&hl=id&&a_s_sdt=0.5#d=gs_qabs&u=%23p%3DRMt9qpt6ap4J.

⁴ Armada Riyanto, *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2013), 16.

martabat Manusia dalam sejarah politik manusia. Revolusi Prancis adalah emblem di mana manusia modern mendeklarasikan dirinya sebagai subjek dan tuan atas tatanan sosialnya.⁵

Manusia itu sendiri pada akhirnya mulai berubah dari tujuan utama saat manusia diciptakan. Manusia itu sendiri telah menghancurkan martabat manusia. Manusia yang sejak penciptaan dilahirkan dalam kebebasannya, kesederajatannya, dan persaudaraannya telah lenyap oleh berbagai bentuk penindasan manusia satu sama lain. Perbudakan menjadi contohnya. Sejak revolusi Prancis martabat manusia mendapat penerjemahnya secara nyata. Politik dan kesepakatan bangsa-bangsa harus mengabdikan kepada manusia. Tata kehidupan bersama harus dikembalikan kepada penghormatan martabat manusia.⁶

Persoalan mengenai manusia tidak akan pernah selesai. Persoalan tentang perdagangan manusia menjadi momok yang menakutkan bagi orang lain di segala penjuru dunia. Badan manusia mengatakan kehadiran. Badan itu mencetuskan “diri” manusia yang menghidupinya. Bukti mengenai kebenaran ini adalah ketika manusia mati tubuhnya dihormati. Di hadapan tubuh seseorang, kita seolah tidak bisa bertindak lain kecuali menghormatinya, kata filosof Levinas. Dan, apabila kita bertindak sebaliknya dengan menciderainya, kita disebut melakukan perbuatan yang melawan perikemanusiaan. Maka, tubuh mewakili kemanusiaan.⁷

Persoalan perdagangan manusia merupakan masalah yang terus menerus terjadi kepada manusia. Gereja juga telah melakukan sebuah tindakan untuk menghentikan tindakan yang menciderai harkat dan martabat manusia. Dalam tulisan ini penulis akan menyempitkan tentang perdagangan manusia. Penulis ingin melihat bagaimana pandangan ajaran sosial gereja dengan HAM dalam menangani permasalahan ini. Untuk membatasi tulisan ini agar lebih sempit, penulis membuat rumusan masalah yang akan merangkum seluruh tulisan ini. Bagaimana pandangan Gereja mengenai perdagangan manusia? Apakah HAM melakukan sebuah tindakan untuk menghentikan perdagangan manusia terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak? Apa solusi yang diberikan oleh Gereja dan HAM untuk menangani masalah ini?

Pandangan ajaran Sosial Gereja Terhadap Human Trafficking

Gereja memandang bahwa perdagangan manusia (*human traffickin*) merupakan tindakan merusak citra Allah, merendahkan martabat manusia, dan melanggar hak asasi manusia. Pandangan gereja terhadap kasus ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya menghargai sisi kemanusiaan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat global, termasuk negara kita sedang mengalami ancaman bagi kemanusiaan yaitu adanya kasus mengenai perdagangan manusia. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus human trafficking (perdagangan manusia). Salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, kemudian ada juga faktor ketidakpedulian negara terhadap masalah-masalah yang ada pada masyarakat dan sebagainya akan tetapi faktor kemiskinan ini adalah penyumbang dan penyebab terjadinya perdagangan manusia paling dominan.⁸

Menyikapi praktik perdagangan manusia Gereja tidak tinggal diam. Dari waktu ke waktu Gereja memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini. Kepedulian Gereja tersebut terungkap melalui

⁵ Ibid., 218.

⁶ Ibid., 220.

⁷ Ibid., 9

⁸ Eduardus Raja para, “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia”, *Jurnal Pastoral dan Kataketik*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm. 1.

seruan-seruan moral para pemimpin Gereja Katolik, sosialisasi, animasi, advokasi dan aksi-aksi sosial dan pastoral dari kongregasi-kongregasi religius, keuskupan-keuskupan, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Katolik untuk menolong para korban perdagangan manusia. Seruan dan advokasi tersebut didorong oleh kesadaran akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah serta memulihkan kembali wajah Allah yang rusak dalam diri para korban perdagangan manusia guna memulihkan martabat manusia yang telah diinjak-injak.⁹

Sepak terjang Gereja di dalam melawan praktik perdagangan manusia juga merupakan tafsiran atas *Evangelium Vitae* (EV) dokumen atau ensiklik yang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik yang terbit 25 Maret 1995 ini mengungkapkan secara rinci posisi Gereja Katolik mengenai nilai hidup manusia yang dalam kondisi apapun harus dibela. Judul dokumen *Evangelium Vitae* (Injil Kehidupan) memberikan implikasi artinya hidup manusia sangat bernilai dan halnya diasalkan dari Tuhan dalam kabar sukacita-Nya. Isu-isu aktual penting yang ditanggapi oleh ensiklik ini tentu saja langsung berkaitan dengan perkara hidup manusia.¹⁰

Gereja Katolik sudah lama menaruh perhatian yang serius terhadap masalah perdagangan manusia dan mengutuk praktik ini. Melalui seruan-seruan moral para pemimpin Gereja, dokumen-dokumen yang berbicara tentang perdagangan manusia maupun lewat aksi-aksi sosial dan pastoral Gereja telah menunjukkan kepeduliannya menyikapi masalah perdagangan manusia.¹¹

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini *Gaudium et Spes* menandakan: “Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya...perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda...begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, semua itu dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, dari pada mereka yang menanggung ketidakadilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta” (GS art.27)6. Seruan moral konsili di atas mengungkapkan perhatian dan kepedulian Gereja terhadap persoalan perdagangan manusia. Tujuannya ialah mengetuk pintu hati semua anggota Gereja untuk bersama-sama mewujudkan kepeduliannya melalui aksi-aksi konkret guna mengatasi persoalan ini.¹²

Dari sudut pandang Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa perdagangan manusia melanggar perintah ketujuh dekalog. Selengkapnya Katekismus menyatakan demikian:

“Perintah ketujuh melarang perbuatan atau usaha, yang karena salah satu alasan egoisme, ideologi, nafsu-mengambil untung atau karena sikap totaliter menyebabkan, bahwa manusia diperhamba, diperkosa dalam martabat pribadinya atau dibeli, dijual atau ditukar bagaikan benda. Adalah dosa melawan martabat manusia dan hak asasinya, dengan segala kekerasan memperlakukan mereka bagaikan barang keperluan sehari-hari atau menjadikan mereka sumber keuntungan. Santo Paulus menghimbau kepada seorang majikan Kristen, agar memperlakukan hambanya yang Kristen “bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba yaitu sebagai saudara yang kekasih” (Flm. 16).

⁹ Armada Riyanto, *Katolisitas Diagonal Ajaran Sosial Khatolik*, (Yogyakarta: Kanisius 2014) hlm. 56

¹⁰ Eduardus Raja para, “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia”, *Jurnal Pastoral dan Kataketik*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm. 3.

¹¹ *ibid*, hlm. 4.

¹² *ibid*, hlm. 5.

Dengan sangat jelas Katekismus menandakan bahwa manusia adalah pribadi yang bermartabat. Dengan demikian manusia tidak bisa dibeli, dijual atau ditukar seperti barang untuk tujuan apapun. Jika manusia diperlakukan demikian maka itu adalah dosa melawan martabat manusia.¹³

Dalam bukunya Armada Riyanto yang berjudul di katakana bahwa dalam Kitab suci, martabat manusia dijelaskan dengan konstruksi asal usul, kisah Genesis. Manusia diciptakan sebagai yang paling tinggi dari segala ciptaan lain. Manusia diciptakan sebagai puncak dari segala ciptaan. Ia mewariskan kekuasaan atas ciptaan lain dari sang pencipta itu sendiri. Ia dihadirkan dengan cinta oleh Sang Cinta. Dan Sang Pencipta membuat manusia lainnya dari tulang rusuknya sendiri.¹⁴

Hal ini mau mengatakan bahwa manusia itu sangat berharga, kehadiran manusia juga merupakan kehadiran Sang pencipta itu sendiri. Maka ketika manusia melakukan tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) hal itu sama saja menjual keluhuran sang pencipta. Manusia sebagai yang paling tertinggi memiliki nilai kemanusiaan yang perlu untuk dihargai. Halnya demikian karena martabat manusia tidak disimak secara keseluruhan dari fondasi dan asal-usulnya, yaitu Tuhan. Relevansinya cinta Tuhan bukan hanya dalam jaminan kehidupan abadi, melainkan martabat hidup manusia saat ini dalam aneka kehidupan.¹⁵

Oleh karena itu Gereja terpanggil untuk memulihkan martabat manusia dan menyembuhkan wajah Allah yang terluka dalam diri para korban perdagangan manusia ketika manusia mengalami ketidakadilan di dalam hidup sehari-hari. Karena itu Gereja sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan dan persekutuan umat Allah yang sedang berziarah menuju Rumah Bapa mesti hadir, terlibat dan bergumul dalam persoalan-persoalan kemanusiaan.

Keterlibatan Gereja tersebut adalah ungkapan kepedulian dan keberpihakan Gereja pada nasib sesama manusia, terutama mereka yang miskin, menderita, terasing, tertindas dan terbuang. Sebab misi Gereja Peziarah di atas bumi ini adalah mencintai Yesus Kristus, menyembah-Nya dan mengasihi-Nya, teristimewa dalam diri mereka yang miskin dan kurang diperhatikan, di antaranya para migran, pengungsi dan korban perdagangan manusia, yang berusaha mencari cara untuk mengangkat beban-beban dari pundak mereka dengan kondisi kehidupan yang berbahaya dan mengancam nasib mereka.

Keluhuran harkat dan martabat manusia pada hakikatnya adalah mutlak yang berlaku semua manusia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keluhuran ini tidak bersifat abstrak, tapi sebuah kenyataan individual dalam hidup sehari-hari. Keluhuran martabat ini terletak dalam interioritas pribadi manusia dalam hubungannya dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Setiap pribadi manusia memiliki nilai dalam dirinya. Sikap dasar menghargai dan menghormati sesama mencerminkan kesadaran manusia akan dirinya yang adalah ciptaan Tuhan yang bermartabat ilahi.¹⁶

Dengan demikian Gereja Katolik tidak membenarkan perdagangan manusia, karena tindakan ini bertentangan dengan pandangan dasar Alkitabiah tentang manusia sebagai citra Sang Pencipta. *Human Trafficking* telah mencederai sejarah kemanusiaan. Martabat manusia direndahkan. Tindakan komersialisasi martabat manusia ditolak karena manusia bukan makhluk ciptaan yang dapat diniagakan. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Tuhan merupakan sebuah antropologi dasar seluruh Ajaran

¹³ Ibid, 6

¹⁴ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 215

¹⁵ Armada Riyanto, *Katolisitas Dialogal,- Ajaran Sosial Katolik*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014), hlm. 57

¹⁶ Linto dan wiliam Chang, *manusia memperdagang manusia?* (Jurnal Ledalero, Vol. 13, No.1, Juni 2014) hlm. 17

Sosial Gereja yang terkait dengan manusia yang seharusnya diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Manusia tidak pernah boleh memperdagangkan manusia.¹⁷

Perdagangan Manusia dalam HAM

Perdagangan manusia oleh banyak pihak dipersoalkan dan dikecam oleh banyak pihak. Hal itu terjadi karena banyak orang berpendapat, bahwa tindakan tidak terpuji itu merupakan suatu bentuk pada pelecehan martabat dan hak asasi tiap manusia. Tindakan tersebut menjadi persoalan setiap negara, dan pemerintahan serta Lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena tindakan itu melanggar Hak Asasi Manusia yang telah disepakati dan dijadikan perjanjian Internasional dan telah diratifikasi di banyak negara. Perdagangan manusia dilarang dan dikecam oleh banyak pihak. Pada bagian ini penulis hendak melihat keterkaitan antara perdagangan manusia dengan HAM, dan apa yang menjadi persoalan di dalamnya.

Hak Asasi Manusia

Sebelum melihat lebih jauh persoalan perdagangan dalam kaitannya dengan HAM, baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu HAM. Menurut Leah Levin HAM adalah “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*”¹⁸ (Hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia).

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mereka merumuskan pengertian HAM sebagai berikut; “these rights derive from inherent dignity of human person” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia).¹⁹

Lalu di Indonesia sendiri juga ada Undang-undang yang mengatur tentang HAM yang dituangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 tercantum pengertian HAM sebagai berikut: “Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini tidak diberikan atau diperoleh dari seseorang, tetapi memang sudah menjadi martabatnya sebagai manusia.²⁰ Jadi entah apa pun suku bangsanya, adat istiadatnya, jenis kelaminnya, kewarganegaraannya atau bahkan warna kulit dari setiap orang yang berbeda-beda, sebagai seorang manusia ia tetap memiliki hak-hak itu. Hak-hak yang melekat pada martabatnya sebagai manusia tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dalam hidupnya, yang berasal dari Tuhan, bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak-hak dapat ada atau tidak

¹⁷ Ibid. hlm 19

¹⁸ Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, (India: National Book Trus, 1998), hlm. 3.

¹⁹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia; Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 2.

²⁰ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

bukan karena orang lain, negara, pemerintahan atau hukum, tetapi karena eksistensinya sebagai seorang manusia. Manusia setara di hadapan sesama manusianya, walau memiliki perbedaan masing-masing.

Lalu apa saja yang menjadi hak-hak dalam diri setiap manusia itu? Menurut pendapat beberapa tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, mereka menyebutkan bahwa hak-hak asasi manusia terdiri dari:²¹ Kemerdekaan atas diri sendiri, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak *Write of Habeas Corpus*, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers.

Sedangkan di negara kita, hak-hak tiap pribadi tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan 34. hak-hak itu antara lain;²² Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak ikut serta dalam pertahanan negara, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi dan atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial.

Perdagangan Manusia

Pasal 3 Persatuan Bangsa-bangsa tahun 2000 dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan menghukum *human trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak memberikan pemahaman mengenai perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kegiatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau dalam bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi.²³

Indonesia pun meratifikasi perjanjian yang bersangkutan dengan *Human Trafficking* dan menjadikannya Undang-undang. Hukum yang membahas tentang perdagangan manusia tercatat dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploitasi.

Kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia juga sering kali terjadi. Bahkan di masa pandemi ini dikatakan mengalami peningkatan yang meresahkan.

Segala perdebatan, bahkan tragedi, persoalan atau kasus hak asasi manusia tidak terletak pada ada atau tidaknya hak asasi manusia dalam suatu sistem kemasyarakatan atau kenegaraan tetapi terletak pada lemahnya kehendak dan atau tidak adanya kemauan dari setiap pribadi, pemerintahan, pelaksana hukum, dan bahkan negara untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Lemah atau tidak

²¹ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hlm. 15.

²² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2020), hlm. 97.

²³ Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* jilid 7 (2), 2015, hlm 184-192.

adanya kemauan tersebut tidak sekedar menempatkan persoalan hak asasi manusia pada suatu medan “netral” melainkan bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi.²⁴

Perdagangan manusia memang pada dasarnya menodai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh banyak pihak. Dalam praktiknya perdagangan ini merenggut kebebasan seseorang untuk hidup, dan kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri. Memang bisa dikatakan penyebab dari perdagangan manusia ini adalah²⁵ lemahnya keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini, ruwetnya birokrasi dan yang mendasar ialah korban sendiri terhimpit dalam masalah ekonomi. Ketika di masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan mereka, menemukan pekerjaan dengan embel-embel kemudahannya menjadi suatu daya tarik bagi perdagangan manusia ini dan hal itulah yang menarik orang yang sudah terhimpit dalam ekonominya untuk menerima pekerjaan yang kelak akan menipu dirinya.

Kesimpulan

Kasus perdagangan manusia tidak pernah berhenti. Meskipun Gereja telah mengeluarkan sebuah ensiklik yang mengarah pada harkat dan martabat manusia, perdagangan manusia tetap terjadi hingga sekarang ini. Meskipun PBB telah membentuk tim dan memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang melakukan tindakan perdagangan manusia, tindakan perdagangan manusia tetap terjadi di mana-mana. Pada saat krisis ekonomi terjadi, perdagangan manusia semakin meningkat.

Seorang perempuan bernama Maria bukan nama yang sebenarnya yang ingin mencari pekerjaan. Saat ia melihat-lihat lowongan pekerjaan di Kupang dan akan diperkerjakan di Singapura, Maria tertarik dan segera mendaftarkan diri. Ia diiming-imingi akan mendapatkan gaji 10 juta perbulan. Namun sebelum berangkat ke Singapura, Maria dan teman-temannya harus di kirim terlebih dahulu ke Batam, tempat penampungan. Selama di penampungan kejanggalan demi kejanggalan terlihat dengan jelas dari ketua yang merekrut mereka. Gaji yang semula 10 juta perbulan dikurangi menjadi juta per bulan. Tetapi ternyata jenis pekerjaan yang ditawarkan hanyalah sebagai pembantu di negara Arab Saudi maupun Malaysia.²⁶

Saat manusia mengalami krisis ekonomi sedang meningkat, tingkat kejahatan juga meningkat dengan drastis. Setiap orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tingkat kejahatan menimbulkan permasalahan. Gereja mengeluarkan sebuah ensiklik *Evangelium Vitae* yang berbicara tentang martabat dan harkat manusia. Perdagangan manusia secara tidak langsung telah merusak manusia itu sendiri. Keberadaan manusia itu secara tidak langsung berubah seperti benda yang dapat diperjualbelikan. Manusia itu seolah-olah tidak berharga. PBB tidak tinggal diam atas kejahatan yang terjadi pada diri manusia. PBB membentuk sebuah aturan untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia. Dari peristiwa dan pengaruh yang diberikan oleh Gereja dan HAM, perdagangan manusia menjadi sebuah tindakan kejahatan yang harus diselesaikan. Ketika satu masalah tidak selesai maka masalah berikutnya akan timbul dan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

²⁴ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Lembaga Kriminologi Universita Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), hlm. 44.

²⁵ Yogi Eka Saputra, “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi”, *Tempo.co*, 15 April 2021 diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>

²⁶ Yogi Eka Sahputra, “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi” *Tempo*, 15 April 2021. Diakses pada 11 Desember 2021 melalui <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>.

Daftar Pustaka

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia; Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Levin, Leah. *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trus, 1998
- Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universita Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Riyanto, Armada. *Menjadi-Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Riyanto, Armada. *Katolisitas Diagonal Ajaran Sosial Khatolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2020.

Sumber Internet

- Linto dan Wiliam Chang, *Manusia Memperdagang Manusia?* (Jurnal Ledalero, Vol. 13, No.1, Juni 2014).
- Munthe, Riswan. “Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* jilid 7 (2). 2015.
- Osmond, Ilhammul Azis. “Peran Internasional Organization for migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2015-2018” (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019).
2. Diakses pada 10 Desember 2021 melalui https://sholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perdagangan+sejaeah&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_fvezOK7YdYJ.
- Para, Eduardus Raja. “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perdagangan Manusia”. *Jurnal Pastoral dan Kataketik*, Vol 4 No. 1, 2019.
- Rufinaldo, Rhany Chairunissa. (2020, Desember 02), “ILO: 40 juta orang jadi korban perbudakan modern”. AA, diakses pada 10 Desember 2021 melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/ilo-40-juta-orang-jadi-korban-perbudakan-modern/2063064>.
- Saputra, Yogi Eka. “Kasus Perdagangan Orang di Batam: Terhimpit Ekonomi di Tengah Pandemi”. *Tempo.co*, 15 April 2021 diakses melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1452721/kasus-perdagangan-orang-di-batam-terhimpit-ekonomi-di-tengah-pandemi>
- Uling, Manintiro. “Tinjauan Manusia sebagai Gambar Allah Terhadap Kasus Human Trafficking di Indonesia,” *Jurnal TE DEUM* No.9 Vol. 2 (2020). Diakses pada 10 Desember 2021 melalui https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=ajaran+sosial+gereja+mengenai+perdagangan+manusia&hl=id&&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DRMt9qpt6ap4J.

MEMAKNAI SEKSUALITAS KATOLIK DALAM KONTEKS SKANDAL SEKSUAL PARA IMAM

Petrus Fransiskus Kowarin

Seminari Tinggi Fransiskus Xaverius Ambon. Email: petrusfransiskuskowarin@gmail.com

Ignasius Samson Sudirman Refo

STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon. Email: ignasius.refo@gmail.com

ABSTRACT

Purpose of this study is to find out meaning, reality and impact of sexual scandals. It is also to examine reaction of the Catholic Church in facing this issue. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological study approach. The phenomenological study approach used as a scalpel to understand the problem of sexual abuse, and to interpret sexuality in that context, as well as to look at response of the Church in this case.

This study underlines several points. First, sexual abuse by priests is an emerging currently topic. Priests committed many sexual scandals and it is exposed in public. The Church apparently tends to protect priests, the perpetrators of crimes than victims. Second, the problem of sexual abuse has a negative impact on victims physically, biologically, psychologically, and spiritually. Third, the Church takes wrong step in resolving the sexual abuse by priests. The church seem protects the victim, but at the same time saves its priest, and even intimidates victims who dare to expose the case in public. Fourth, sex and human instinctive life are good. God gives it to us, and human uses it with the consciousness of the human person. In addition, clergy needs to realize and reflect more on vow of chastity as a pastoral minister. They also have to see value of life, dignity and freedom of the human person.

Keywords: *Sexuality, Sexual deviation, Ministry, Pastoral, Church*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang realitas dan dampak dari skandal seksual; untuk mengetahui sikap atau tindakan Gereja menyikapi persoalan ini serta untuk mengetahui makna seksualitas dalam konteks realitas skandal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Pendekatan studi fenomenologi ini digunakan sebagai pisau bedah untuk melihat dan memahami permasalahan *sexual abuse* serta sikap Gereja Katolik dalam menanggapi kasus tersebut dan mencoba untuk memaknai seksualitas dalam persoalan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama, sexual abuse* oleh para imam menjadi suatu topik yang mengemuka saat ini. Hal ini disebabkan lewat terungkapnya banyak kasus skandal seksual. Kasus ini menjadi suatu pukulan untuk Gereja Katolik karena dipandang tidak mampu melindungi mereka yang menjadi korban dari kejahatan para

imam sebaliknya melindungi para imam sebagai pelaku kejahatan. *Kedua*, permasalahan *sexual abuse* membawa dampak untuk korban yang mengalami gangguan secara fisik-biologis, tetapi juga secara psikologis dan spiritual. *Ketiga*, dengan melihat persoalan ini, sikap Gereja yakni umumnya melindungi korban dari sexual abuse ini, tetapi langkah diambil dipandang keliru dan menimbulkan banyak pertanyaan lagi sehingga otoritas Gereja mengambil tindakan yang dipandang di satu sisi Gereja tegas dengan menjerat pelaku, tetapi juga di pihak lain melindungi pelaku pelecehan seksual. Para korban berani tampil di depan publik, maka Gereja mencabut kerahasiaan tersebut. *Keempat*, seks dan kehidupan naluriah manusia itu baik. Tuhan memberikannya untuk disalurkan sesuai dengan kesadaran pribadi manusia. Sehingga perlu untuk menyadari kembali kaul kemurnian sebagai pelayan pastoral. Tetapi juga menyadari kembali akan kehidupam, martabat dan kebebasan pribadi manusia.

Kata Kunci: *Seksualitas, Penyimpangan seksual, Pelayanan, Pastoral, Gereja*

PENDAHULUAN

Pelecehan dan skandal seksual (*sexual abuse*) oleh para imam telah menjadi topik yang mengemuka. Kenyataan ini disebabkan oleh terungkapnya banyak kasus skandal seksual para imam yang terjadi di banyak negara terutama di Amerika Serikat. Kasus-kasus ini merupakan pukulan bagi Gereja Katolik, karena dipandang tidak mampu melindungi mereka yang menjadi korban dari kejahatan para imam dan sebaliknya melindungi para imam sebagai pelaku kejahatan. Puncak dari persoalan ini terjadi di Amerika Serikat dengan banyaknya imam yang diputuskan bersalah dan menjalani proses hukum. Kini beberapa Keuskupan di Eropa pun mulai mengalami nasib yang kurang lebih serupa.¹

Dalam Gereja Katolik begitu dihormati dan memegang peran penting dalam karya-karya pastoral Gereja. Pada masa lampau, pelayanan pastoral Gereja, yang adalah kelanjutan dari karya Kristus, hanya dibebankan pada para imam sebagai pelayan-pelayan tertahbis. Artinya, hanya yang tertahbis yang mengemban tugas dan tanggung-jawab atas pelayanan Gereja. Di masa kini, meskipun partisipasi awam mendapat perhatian Gereja, tetapi peran dan penghayatan atas imamat tetap memiliki tempat istimewa dalam Gereja. Kitab Hukum Kanonik (KHK) memberikan instruksi bahwa mereka yang menerima sakramen imamat adalah laki-laki terpilih (kan. 1024) yang diangkat menjadi pelayan rohani dengan meterai yang tidak terhapuskan (kan. 1008). Pentahbisan tersebut adalah anugerah dimana Allah mengambil inisiatif memanggil secara khusus pribadi-pribadi untuk terlibat dalam karya pelayanan rohani melalui imamat suci. Mereka dipilih dan dikonsekrasikan oleh Allah sendiri, diutus oleh Putera dan dijiwai oleh Roh Kudus² demi pelayanan kepada umat Allah serta bertindak *in persona Christi*. Kuasa imamat sungguh merupakan sebuah anugerah istimewa karena darinya seorang imam bertindak bukan saja dalam nama Yesus melainkan *in persona Christi*. Privilese yang seagung itu dikenakan pada seorang manusia biasa tentu bukan sebuah prestasi melainkan panggilan Tuhan demi menggembalakan dombaNya menurut ketetapan Yesus sendiri (Yoh. 21:15).

¹ “3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak,” CNN Indonesia (Jakarta, 2021), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>

² Edison R. L. Tinambunan, “Formasi Berkelanjutan: Membermakan Kekinian Imamat,” dalam *Studia Philosophica et Theologica*, No. 1. 2020, hlm. 28

Kreativitas para imam telah menciptakan banyak bentuk-bentuk karya pelayanan pastoral, yang bukan saja berada di seputar mimbar dan altar, tetapi merambah pula di bidang-bidang pendidikan, pembinaan dan karya karitatif. Untuk meningkatkan pelayanan pastoral, para imam mengucapkan janji untuk tidak kawin dan memelihara kemurnian demi Kerajaan Allah.

Skandal seksual para imam memang tidak sampai mematikan karya pelayanan Gereja. Karya pelayanan pastoral Gereja akan terus berlanjut, apalagi kini dengan kian besarnya partisipasi awam dalam karya pastoral tersebut. Meskipun demikian, skandal seksual tetap saja merupakan pukulan bagi Gereja berkaitan dengan komitmen dan integritas dari para pelayan Gereja yang utama. Awalnya, otoritas Gereja menyangkal, berusaha meminimalisir, dan bahkan menyalahkan media, korban dan keluarganya. Richard Sipe menerangkan bahwa Gereja berusaha membela diri dan cenderung menyangkal dan banyak imam bahkan merasa tidak bersalah telah melakukannya.³ Namun, Gereja akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Fakta demi fakta dimunculkan. Ini sungguh-sungguh terjadi dan bukan semata hasil rekayasa. Gereja pun akhirnya memandang masalah ini dengan serius dan harus tegar menghadapi. Bagi Gereja Katolik Indonesia, peristiwa ini tentu menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dan mengevaluasi diri agar hal serupa tidak terjadi.

Berkaitan dengan skandal seksual yang dilakukan para imam, tulisan ini hendak memaparkan realitas skandal tersebut sebagaimana ditemukan dalam publikasi? Kemudian, atas dasar realitas tersebut, hendak dijawab pertanyaan, bagaimana dampak dari skandal seksual tersebut? Bagaimana tindakan Gereja menyikapi skandal seksual tersebut? Bagaimana memaknai seksualitas dalam konteks realitas skandal seksual tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Metode kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk dan mempengaruhi studi tentang persoalan yang digumuli dalam suatu penelitian.⁴ Dalam metode kualitatif ini, digunakan studi kepustakaan (*library research*) akan menjadi pilihan dalam proses pengumpulan sumber-sumber, terutama sumber dokumen Gereja, tulisan-tulisan teologis, pemikiran kristiani juga beberapa penelitian sebelumnya memberikan sumbangan dalam melengkapi penelitian ini.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi digunakan sebagai pisau bedah untuk melihat dan memahami permasalahan *sexual abuse* dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kuasa imamat para imam dari sudut pandang ajaran Gereja. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi ini dimaksudkan untuk memahami sikap Gereja Katolik dalam menanggapi kasus *sexual abuse* dan mencoba memaknai seksualitas dalam persoalan tersebut.

³ A.W.R. Sipe *Celibacy in Crisis A Secret World Revisited*, New York: Brunner-Rouledge, 2003, hlm. 199.

⁴⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 56

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Skandal Seksual

Penelitian selama 25 tahun dari fasilitas klinik psikologi untuk para imam dan biawan/wati yang berjumlah sekitar 1.322 orang imam menyatakan bahwa ada sekitar 2,7% kasus pelecehan seksual pada anak-anak di bawah 18 tahun, dan 61% imam yang diteliti tidak terlibat dalam kasus seksual. Penelitian lain di USA semenjak tahun 1960-2004 ada sekitar 800 kasus pelecehan seksual pada anak yang dilaporkan, dan ada 300 imam yang telah dilaporkan melakukan pelecehan seksual pada anak-anak. Plante (1999) menggabungkan penelitian dari klinik rehabilitasi Canada dan data para peneliti di Amerika, dia menyimpulkan bahwa ada sekitar 6% imam terlibat dalam kasus pelecehan. Artinya ada sekitar 900 imam terlibat dalam kasus pelecehan mulai dari tahun 1950 – 1999.⁵

Dalam laporan di Pennsylvania terungkap terjadinya pelecehan seks selama 70 tahun. Penyelidikan itu menemukan lebih dari 1.000 anak dilecehkan oleh 300 pastur di negara bagian Amerika Serikat itu. Penyelidikan itu menemukan bukti sistematis adanya langkah gereja dalam menutup-nutupi sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak, yang sebagian besar sudah terlalu lama untuk bisa diproses hukum. Setelah laporan itu diungkapkan, Vatikan mengatakan Paus membela dan menyatakan keberpihakannya kepada para korban.⁶

Data terakhir tahun 2018 menunjukkan ada sekitar 300 imam di Keuskupan Philadelphia telah melakukan pelecehan seksual pada sekitar 1000 anak-anak dari tahun 1940–2018. Pada bulan Agustus 2018, Grand Jury di negara bagian Pennsylvania (PA) mengeluarkan laporan setebal 900 halaman yang menyatakan bahwa pelecehan seksual pada anak-anak sungguh terjadi, dan meminta semua keuskupan di wilayah PA memberikan dokumen Gereja pada hakim negara untuk diselidiki. Sekarang ini hampir semua keuskupan di USA memberikan pernyataan untuk bersedia bekerjasama dengan pengadilan guna membuka dokumen untuk melihat kasus-kasus pelecehan yang terjadi selama ini. Tanggal 14 September 2018, Keuskupan Salt Lake City menyatakan bahwa ada 16 imam Katolik yang sedang diproses dalam kasus pelecehan pada 34 anak-anak sejak tahun 1990. Tanggal 8 Oktober 2018, Keuskupan Owensboro, Kentucky menyatakan bahwa ada 27 imam yang terkena kasus pelecehan seksual sejak tahun 1937. Ada 15 keuskupan di negara bagian Texas yang akan mempublikasikan nama-nama imam yang terlibat dalam pelecehan seksual paling lambat pada 31 Januari 2019.⁷

Kasus pelecehan seksual tidak hanya melibatkan para imam, tapi juga para uskup yang dengan sengaja atau tidak sengaja menutupi kasus-kasus yang terjadi di keuskupannya. Mantan Kardinal McCarrick adalah Uskup Agung Emeritus untuk Keuskupan Washington DC dan dia diangkat menjadi Kardinal tahun 2001. Tahun 2017 McCarrick dituduh telah melakukan pelecehan seksual pada seorang anak misdinar di New York saat McCarrick bertugas di sana 40 tahun lalu. Bulan Agustus 2018, Paus mencopot jabatan Kardinal dari McCarrick, dan kini pada usia 88 tahun dia dijatuhi hukuman tahanan rumah, dan dilarang dekat dengan anak-anak. Bulan Juli 2018, Uskup agung Philip Wilson dari Keuskupan Adelaide, Australia juga mengundurkan diri karena dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah menyembunyikan kasus pelecehan seksual para imamnya. Dia dihukum 1 tahun penjara dan

⁵ Agustinus Tri Edy Warsono. *Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia*. (Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat Volume. 10 Nomor 2 April 2020), hlm. 167.

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45254160>

⁷ Agustinus Tri Edy Warsono. *Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia*. (Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat Volume. 10. Nomor 2. April 2020), hlm. 167.

dicopot dari jabatan uskupnya. Pada tanggal 21 September 2018, Paus menerima pengunduran diri 5 Uskup dari Chili yang terkena kasus telah menutupi persoalan pelecehan seksual beberapa imam di Keuskupan mereka.⁸

Di Paris Prancis, Komisi Independen Prancis tentang Pelecehan Seksual di Gereja (*Commission independante sur les abus sexuelle dan l'eglise*, CIASE) pada tanggal 17 Juni 2020 melaporkan bahwa lebih dari 3000 anak telah mengalami pelecehan seksual. Sekitar 1.500 imam dan pejabat Gereja menjadi pelaku. Pada Januari 2020, pengadilan terhadap Bernard Preynat, 74 tahun, yang sebelumnya adalah seorang imam, telah membuktikan bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 80 anak selama periode 1980an sampai 1990an. Ia mengakui bahwa selama dua dekade tersebut ia telah melakukan pelecehan seksual.⁹

Di Polandia Gereja Katolik menduga bahwa hampir 400 imam telah melecehkan anak-anak selama 30 tahun terakhir. Pimpinan Gereja Katolik Polandia telah meminta Vatikan untuk menyelidiki dugaan pelecehan seksual oleh para imam yang diklaim telah ditutup-tutupi selama ini.¹⁰

Dari berbagai kasus pelecehan seksual di atas tidak hanya melibatkan imam dan biarawan/wati, tetapi juga uskup dan hampir terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Dari data kasus ini menunjukkan bahwa seorang selibater dalam hal ini para pelayan pastoral gereja berada pada titik di mana berhadapan langsung dengan ranah hukum yang menjeratnya. Selain itu, dalam kasus tersebut tentu meminta tanggapan dari Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia untuk menangani persoalan ini.

2. Dampak Skandal Seksual

Skandal seksual yang terjadi telah menimbulkan dampak bagi korban dan bagi Gereja Katolik sendiri. Skandal seksual yang dilakukan terhadap anak-anak oleh para imam membawa dampak yang serius bagi korban. Mereka mengalami kerugian secara fisik-biologis, khususnya akibat penetrasi vaginal maupun anal. Selain itu mereka pun mengalami kerugian secara psikologis. Mereka mengalami pengalaman traumatik yang mendalam, serius dan berlangsung lama. Selain itu mereka mengalami perasaan bersalah, menyalahkan diri mereka sendiri, dan mengalami depresi. Bahkan ketika dewasa pun mereka tetap dihantui perasaan bersalah itu. Selain masalah fisik-biologis dan psikologis yang sifatnya internal, ada dari antara mereka yang kemudian justru menyebabkan masalah eksternal dengan membuat skandal baru. Mereka menjadi “monster baru” yaitu pelaku pelecehan seksual.

Skandal seksual ini pun menjadi pukulan telak bagi Gereja Katolik. Kredibilitas Gereja Katolik mengalami goncangan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Prancis. Banyak imam bersalah diputuskan beresalah dan menjalani proses hukuman. Bukan hanya mereka, beberapa kardinal dan uskup menyatakan mundur dari jabatannya setelah dikaitkan dengan persoalan skandal tersebut. Selain itu beberapa Keuskupan di Amerika dinyatakan bangkrut akibat tuntutan untuk membayar ratusan juta dolar sebagai bentuk kompensasi terhadap para korban.

⁸ *Ibid.*

⁹ “3.000 Anak Alami Pelecehan Seksual di Gereja Katolik Prancis”. <https://www.beritasatu/dunia/6465093000-anak-alami-pelecehan-seksual-di-gereja-katolik-prancis>

¹⁰ “Skandal Pelecehan Seks: Film Dokumenter Dirilis, Uskup Agusng Polandia Minta Vatikan Selidiki Tudingan Pelecehan Seksual di Gereja Katolik”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52696118>

3. Sikap Gereja Katolik

Persoalan menyangkut skandal seksual mendapat sorotan bahkan kritikan keras berbagai pihak. Namun setiap kasus yang terjadi tidak dapat dilihat sama. Umumnya Gereja Katolik berusaha untuk melindungi korban skandal seksual. Karena korban tersebut sangat rawan dieksploitasi. Gereja menghormati korban agar tidak menjadi konsumsi. Namun tindakan ini dipandang keliru, sehingga dalam menanggapi hal tersebut kini Otoritas Gereja bertindak tegas, agar memberikan kepastian arah Gereja berhadapan dengan persoalan tersebut. Di satu sisi Gereja tegas dengan menjerat pelaku, tetapi juga di pihak lain melindungi pelaku pelecehan seksual. Para korban berani tampil di depan publik, maka Gereja mencabut kerahasiaan tersebut.

Dari persoalan dan pendekatan atau solusi yang dihadapi menyangkut perilaku seksual yang menyimpang atau konkritnya pelecehan seksual ini, pada tanggal 20 Agustus 2018, kurang dari seminggu setelah laporan yang memberatkan oleh jaksa penuntut Pennsylvania tentang pelecehan seksual oleh para imam diterbitkan di Amerika Serikat, Paus mengalamatkan surat "Surat kepada umat Allah". Dalam teks ini Paus meminta tanggapan dari seluruh gereja terhadap paus dalam suratnya kepada umat Allah tentang pelecehan seksual. Paus meminta semua orang Kristiani untuk berusaha mengakhiri budaya klerikalisme, dan mengajak umat beriman untuk berdoa dan berpuasa. Bagi Paus, "melalui doa dan pertobatan, kita akan dapat masuk ke dalam keselarasan pribadi dan komunal dengan ini sehingga karunia belas kasih, keadilan, pencegahan dan perbaikan dapat tumbuh di antara kita."¹¹

Dalam *Surat Paus Fransiskus kepada Hamba Tuhan: Mengecam Pelecehan Seks oleh Pastor*, Paus Fransiskus mengecam "kekejaman" pelecehan seksual anak dan langkah yang dilakukan para pemuka agama dalam menutupi berbagai kasus. Dalam Surat tersebut paus, menyerukan untuk mengakhiri "budaya kematian" dalam Gereja dengan merujuk pada gagalnya upaya menangani pelecehan. Dalam surat pertama Paus yang ditujukan kepada seluruh umat Katolik dengan topik pelecehan seks ini, Paus menyerukan agar seluruh warga Gereja untuk dapat mengakui dan mengecam, dengan kepedihan dan rasa malu, kekejaman yang dilakukan oleh pemuka agama, dan mereka semua yang dipercaya untuk menjalankan karya pastoral untuk mengasihi mereka yang sangat rentan.¹²

Dalam surat yang dikeluarkan Paus Fransiskus tanggal 7 Mei 2019 itu menjadi suatu norma yang berlaku umum bagi Gereja Katolik dalam melihat akan persoalan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh para klerikal maupun kaum religius. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa Para Uskup dan Pemimpin Tarekat bertanggungjawab atas tindakan mereka jika berani menyembunyikan kasus penyalahgunaan seksual yang dilakukan oleh para imamnya. Ia yang seharusnya melindungi para korban, malah justru melindungi para tersangka pelaku (bdk. art. 1 §1.b). Tetapi juga Penekanan pada pentingnya melindungi anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang rentan (bdk. art. 1 §2.b)

Dalam *Motu Proprio Vox Estis Lux Mundi* (Kamu adalah Terang Dunia), Paus menetapkan norma-norma umum yang berlaku bagi Gereja universal tentang prosedur baru melaporkan dan memproses kasus pelecehan seksual di dalam Gereja. *Motu Proprio* ini juga menyatakan bahwa Otoritas Gerejawi telah berkomitmen untuk memastikan mereka yang menyatakan telah dirugikan, bersama dengan keluarga mereka, diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Secara khusus diingatkan bahwa

¹¹ <https://www.dokpenkwi.org/2018/08/27/surat-paus-fransiskus-kepada-umat-allah-tentang-pelecehan-seksual-oleh-para-klerus/>. Dirilis pada tanggal 27 Agustus 2018.

¹² *Ibid.*

mereka yang telah dirugikan hendaknya: a) disambut, didengarkan dan didukung, termasuk melalui pemberian pelayanan tertentu; b) ditawarkan bantuan spiritual; dan c) ditawarkan bantuan medis, termasuk bantuan terapeutik dan psikologis, sebagaimana dituntut oleh kasus yang khusus. Ditekankan pula, nama baik dan privasi orang-orang yang terlibat dan juga kerahasiaan mengenai data pribadi mereka, hendaknya dilindungi. (Art.5)

Selain itu pula, telah dibuat ketentuan baru di bagian hukum pidana yang direvisi dari Kitab Hukum Kanonik di Vatikan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pastor dan kaum awam. Dalam UU baru yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, pelecehan seksual kini juga dikategorikan sebagai kejahatan "terhadap kehidupan, martabat dan kebebasan pribadi manusia," tidak lagi terdaftar sebagai pelanggaran selibat.¹³

Pada tahun 2020, Vatikan kembali mengeluarkan pedoman penanganan kasus skandal seksual terhadap anak di bawah umur dalam Gereja. Pedoman ini mendorong para imam melaporkan pelecehan seksual kepada otoritas sipil meskipun tidak diharuskan oleh hukum setempat. Dokumen setebal 20 halaman, yang disebut *Vademecum*, ini dikeluarkan pada Kamis 16 Juli 2020 oleh Kongregasi Ajaran Iman. Ini adalah dokumen terakhir yang dijanjikan Vatikan setelah tuntutan utama para pemimpin Gereja dalam pertemuan puncak tentang skandal pelecehan seksual, yang diadakan pada Februari 2019. Dokumen ini tidak mengeluarkan norma-norma baru atau mengoreksi hukum yang berlaku saat ini, tetapi bermaksud sebagai panduan bagi uskup, keuskupan, dan komunitas-komunitas tentang cara mengikuti prosedur Gereja dalam kasus-kasus pelecehan seksual.

4. Makna seksualitas dalam Konteks Skandal Seksual

Skandal seksual yang dilakukan oleh para imam telah memunculkan pertanyaan seputar makna seksualitas? Apa pandangan Gereja Katolik tentang seksualitas? Bagaimana skandal seksual para imam menjadi pengingkaran atas luhurnya seksualitas? Bagaimana skandal seksual telah mengingatkan semua umat beriman tentang arti penting menghargai seksualitas manusia?

Ajaran Gereja Katolik tentang seksualitas bersumber dari hukum kodrati, Kitab Suci dan tradisi, yang ditafsirkan secara otoritatif dan diajarkan oleh magisterium Gereja (KGK 74-79 dan 1953-1955). Ajaran Moral Seksual ini berprinsip bahwa kenikmatan seksual adalah tidak teratur secara moril apabila dicari demi dirinya, dan dengan demikian terlepas dari tujuan batinnya untuk melanjutkan kehidupan (tujuan prokreatif) dan untuk hubungan cinta kasih". (KGK 2351) Dengan demikian, Gereja Katolik mengajarkan bahwa antara kehidupan manusia dan seksualitas manusia adalah tidak dapat dipisahkan (KGK 2331-2400).

Pada prinsipnya Gereja Katolik mengajarkan bahwa seks dan tubuh manusia itu baik baik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah menciptakan umat manusia menurut keserupaan dan citra-Nya sendiri, serta "Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik". Gereja memandang ungkapan cinta antara suami dan istri sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang ditinggikan, menyatukan suami dan istri dalam pemberian diri timbal balik yang sepenuhnya, dan membuka hubungan mereka akan kehidupan baru.

Paus Paulus VI menyatakan dalam ensiklik *Humanae Vitae* bahwa "Aktivitas seksual, yang di dalamnya suami dan istri saling bersatu secara intim dan murni, yang melaluinya kehidupan manusia

¹³ <https://www.dw.com/id/uu-baru-vatikan-perberat-hukuman-pelecehan-seksual/a-57752526>. Dirilis pada Tanggal 02.06.2021

diteruskan, adalah 'luhur dan berharga' sebagaimana diingatkan oleh Konsili baru-baru ini." Seksualitas adalah energi yang suci dan kuat, yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang mendorong manusia untuk membangun sebuah relasi intim. Seksualitas membuat manusia menjadi pribadi yang utuh yang dapat mencintai, memperhatikan, dan membangun relasi yang intim dengan orang lain.

Gereja mengajarkan bahwa hubungan seksual memiliki suatu tujuan; dan melakukannya di luar pernikahan adalah bertentangan dengan tujuannya. Katekismus menyatakan "Cinta kasih suami-istri mencakup keseluruhan. Di situ mencakup semua unsur pribadi: tubuh beserta naluri-nalurnya, daya kekuatan perasaan dan efektivitasnya, aspirasi roh maupun kehendak. Yang menjadi tujuan yakni: kesatuan yang bersifat pribadi sekali; persatuan yang melampaui persatuan badani dan mengantar pada persatuan satu hati dan satu jiwa; kesatuan itu memerlukan sifat *tidak tercerai-berai* dan *kesetiaan* dalam penyerahan diri secara timbal balik yang defenitif, dan kesatuan yang terbuka pada keseluruhan" (KHK 1643). Dengan demikian cinta kasih suami istri terwujud dalam perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan suatu tanda cinta kasih Allah kepada manusia (KHK 1617). Kehidupan manusia dan seksualitas manusia adalah tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan adalah suatu yang suci. Oleh karena umat Katolik percaya bahwa Tuhan menciptakan umat manusia berdasarkan citra dan kemiripan-Nya, serta bahwa Tuhan menjadikan semua yang diciptakannya sebagai hal-hal yang "sangat baik" (Kitab Kejadian 1:31).

Ketika laki-laki atau perempuan memilih untuk hidup selibat (tidak kawin demi Kerajaan Allah), ini berarti ia meninggalkan seksualitasnya. Seksualitas harus dimaknai dengan dengan penerimaan diri sebagai pria atau perempuan dan dorongan yang menggerakkannya untuk berelasi dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam semesta. Hidup selibat memang seringkali dianggap sebagai hidup tanpa seksualitas. Hal itu tampak dari sikap ekstrem terhadap kecenderungan yang merupakan bagian dari seksualitas.¹⁴

Hal yang perlu disadari oleh kaum selibater adalah bahwa pilihan hidup selibat merupakan panggilan Tuhan dan pilihan yang bebas. Karena itu, hidup selibat bukanlah sesuatu yang kaku melainkan sesuatu yang harus berkembang. Untuk maksud tersebut ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yakni kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan komunitas tempat tinggal dan pelayanan kepada orang lain.

Dalam menghayati kaul kemurnian, semua selibater dituntut untuk menyerahkan diri secara utuh. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kaul kemurnian berkaitan erat dengan seksualitas manusia. Konsekuensi dari kenyataan itu adalah bahwa seksualitas tidak dapat dipisahkan dari penghayatan kaul kemurnian. Dengan kata lain, penerimaan seksualitas menjadi penting dalam penghayatan kaul kemurnian. Sebagai contoh, seseorang yang membenci seksualitasnya tidak dapat menyerahkan dirinya secara utuh kepada Allah. Pada sisi yang lain, seseorang yang merealisasikan seksualitasnya secara berlebihan dan melanggar kaul kemurnian bukan juga merupakan sesuatu yang baik.

Skandal seksual yang dilakukan oleh para imam merupakan perilaku yang mencederai nilai kemanusiaan, sebab berlawanan dengan otoritas moral dan kredibilitas etika yang merupakan nilai dari cerminan Gereja. Skandal seksual merusak kasih kepada Tuhan dan melanggar pula kasih kepada sesama.¹⁵ Karena dampak skandal seksual, Gereja Katolik bersikap tegas dengan membuka ruang bagi hukum sipil bagi para imam yang terlibat skandal seksual. Persoalan skandal seksual berhubungan dengan spiritual, maka hukumannya bersifat spiritual. Namun, jika para imam melakukan pelanggaran skandal

¹⁴ Superno. *Saat Jubah Bikin Gerah 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 18-19.

¹⁵ J. Verkuyl, *Etika Seksuil* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012 hlm. 113

seksual, hukuman Gereja pada umumnya adalah pemecatan dari statusnya. Namun jika berkaitan dengan tindak pidana, Gereja tidak memiliki sanksi untuk menghukum. Gereja adalah sebuah lembaga spiritual, maka Gereja tidak mau berkaitan dengan hal yang bukan spiritual. Jika ada skandal seksual yang berhubungan dengan tindak pidana yang ditangani secara sipil, maka Gereja mendorong ke sana.

Dari berbagai persoalan di atas, tentunya membawa dampak yang sangat signifikan dalam kerangka memahami dan memaknai seksualitas dalam pelayanan pastoral gereja. Makna seksualitas manusia yang dasariah adalah suatu anugerah yang berasal dari Allah. Seksualitas dilihat bukanlah sumber kesengsaraan, kesakitan dan penderitaan yang disebabkan oleh mereka yang menyalahgunakan atau salah mengartikan arti seksualitas tersebut. Seksualitas sebetulnya sumber kegembiraan, penyembuhan, kasih, pemeliharaan dan tidak mementingkan diri sendiri yang sesungguhnya.¹⁶ Berikut ini beberapa hal penting yang diangkat untuk memahami dan memaknai seksualitas dalam pelayanan pastoral gereja antara lain: pertama, seksualitas menyangkut kehidupan, martabat dan kebebasan pribadi manusia. Setiap manusia sungguh merindukan untuk kehidupannya tidak berakhir sia-sia, atau dikekang oleh orang lain. Dan hal ini berhubungan dengan martabatnya yang sungguh mulia di antara makhluk ciptaan lainnya. Maka kebebasan sebagai pribadi manusia perlu untuk dihormati oleh orang lain. Maka martabat manusia menuntut, supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas, artinya, digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta, atau semata-mata paksaan dari luar. (GS. 17) Kedua, seksualitas menyangkut pelayanan pastoral gereja. Dengan kekuasaan dari yang pejabat yang berwenang, pelecehan seksual dapat dilakukan oleh mereka, sehingga kekuasaan dapat saja memberikan harapan tetapi juga memberikan ancaman. Maka melalui doa dan pertobatan kehidupan seksualitas dimurnikan sehingga keselarasan pribadi dan komunal dengan Tuhan dan sesama dapat berjalan dengan baik. Budaya klerikalisme dapat saja membuat para klerus jatuh pada kecenderungan seksualitas yang tidak sehat dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Sehingga selain doa dan pertobatan, para pelayan pastoral gereja menyadari akan fungsi-fungsi pelayanan pastoral gereja sebagai pembimbing, penopang, penyembuh, pengasuh, dan pendamai. Hal ini menjadi langkah untuk melihat seksualitas sebagai sesuatu yang sehat karena memberikan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang pantas.

KESIMPULAN

Persoalan Pelecehan seksual (*sexual abuse*) kini menjadi suatu persoalan yang sudah menguak atau mengemuka di tengah kehidupan masyarakat khususnya dalam Gereja Katolik. Penyebabnya dengan terungkapnya banyak kasus skandal seksual yang dilakukan oleh para selibater terhadap korban skandal seksual tersebut. Problem ini membuat integritas dalam pelayanan menjadi cacat atau terhambat sebagaimana yang diharapkan yakni mereka menjadi tonggak dari karya pelayanan untuk umat khususnya dengan melaksanakan tugas-tugas gereja tersebut.

Gereja jauh sebelumnya lebih banyak menanggapi persoalan ini dengan melindungi korban dan juga pelaku skandal tersebut. Gereja melindungi korban dengan memberikan santunan tetapi juga hal-hal yang dapat melindungi korban. Tetapi juga Gereja melindungi atau membiarkan pelaku berkeliaran dan terus melakukan hal yang sama tanpa memberikan efek jerah kepadanya. Sehingga efek dari itu yakni korban mengalami gangguan secara fisik-biologis, tetapi juga secara psikologis dan spiritual dan mengalami depresi yang berkepanjangan bahkan seumur hidup. Maka dengan mengemuka persoalan ini

¹⁶ Anne Krabill, Hershberger. *Seksualitas: Pemberian Allah*. Jakarta: Gunung Media. 2008, hlm, 4.

maka otoritas Gereja disadarkan untuk mengambil tindakan yang dipandang dapat melindungi korban dan menjerat pelaku skandal tersebut. Sehingga seruan apostolik dari Paus Fransiskus lewat tulisan-tulisannya lebih banyak mengecam dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual (*sexual abuse*) tetapi juga memberikan suatu tindakan lebih lanjut bagi para pelaku tersebut.

Pada prinsipnya Gereja Katolik mengajarkan bahwa seks dan tubuh manusia itu baik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah menciptakan umat manusia menurut keserupaan dan citra-Nya sendiri, serta "Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik". Oleh karena itu, para pelaku pelecehan seksual (*sexual abuse*) perlu untuk menyadari kembali akan arti dari kehidupan martabat dan kebebasan pribadi manusia dalam tugas-tugas gereja yang diemban kepadanya khususnya dalam karya pelayanannya.

Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang hendak dilakukan yakni Gereja perlu meningkatkan usaha yang memungkinkan para imam lebih sulit untuk melakukan tindakan pelecehan, mengambil langkah penting dalam menyempurnakan tujuan ini dengan menerapkan program-program pelatihan lingkungan yang hati-hati, mendidik para korban potensial (anak-anak), para pelaku pelecehan potensial (para imam), dan para wali atau pelindung (mereka yang ada dalam gereja, baik orang tua maupun anggota komunitas lain yang secara sadar bahwa pelecehan biasa saja terjadi).

Gereja juga perlu mengingatkan adanya resiko tindakan tegas bagi para pelaku pelecehan, melalui penerapan kebijakan "zero tolerance" dan kemungkinan "ditangkap" bagi para mereka yang dikenal sebagai pelaku pelecehan. Gereja harus dapat menghilangkan sikap excuse tindakan pelecehan para imam melalui pendidikan mengenai perilaku nama yang layak dan tidak layak dilakukan pada anak-anak. Ini penting bagi para imam sehingga mereka tidak dapat membenarkan tindakan pelecehan seksual yang mereka lakukan pada anak. Gereja harus mengurangi kebutuhan para imam untuk membangun ikatan sosial dengan anak remaja yang mereka dampingi juga dapat mengurangi level terjadinya pelecehan. Para imam harus mempunyai cara untuk membangun persahabatan-persahabatan sosial dan ikatan-ikatan yang tepat sesuai dengan usianya. Atas semua cara itu seruan Paus lewat kecaman dan kutukan untuk para pelaku tersebut mengingatkan untuk perlunya meningkatkan hidup doa, mati raga, dan pertobatan dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Jurnal dan Buku

- Tinambunan, Edison R. L. "Formasi Berkelanjutan: Membermakan Kekinian Imam," dalam *Studia Philosophica et Theologica*, No. 1. 2020.
- A.W.R. Sipe *Celibacy in Crisis A Secret World Revisited*, New York: Brunner-Rouledge, 2003.
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Agustinus Tri Edy Warsono. *Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia. (Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat Volume. 10 Nomor 2 April 2020)*.
- J. Verkuyl, *Etika Seksuil* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Anne Krabill, Hershberger *Seksualitas: Pemberian Allah*. Jakarta: Gunung Media, 2008.

- Superno, *Saat Jubah Bikin Gerah 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Yohanes Driyanto (terj). *Vox Estis Lux Mundi: Motu Proprio Paus Fransiskus*. Jakarta: Dokpen KWI, 2019.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Jakarta: Obor, 1993.

b. Internet

- <https://www.dokpenkwi.org/2018/08/27/surat-paus-fransiskus-kepada-umat-allah-tentang-pelecehan-seksual-oleh-para-klerus/>. Dirilis pada tanggal 27 Agustus 2018.
- <https://www.dw.com/id/uu-baru-vatikan-perberat-hukuman-pelecehan-seksual/a-57752526>. Dirilis pada Tanggal 02.06.2021
- “3.000 Anak Alami Pelecehan Seksual di Gereja Katolik Prancis”. <https://www.beritasatu/dunia/6465093000-anak-alami-pelecehan-seksual-di-gereja-katolik-prancis>
- “Skandal Pelecehan Seks: Film Dokumenter Dirilis, Uskup Agusng Polandia Minta Vatikan Selidiki Tudingan Pelecehan Seksual di Gereja Katolik”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52696118>
- “3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak,” CNN Indonesia (Jakarta, 2021).
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45254160>